

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK MISKIN, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN
RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2024**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Nama : Alfira Putri Daneswari
Nomor Mahasiswa : 143220055
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2025**

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK MISKIN, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN
RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2024**

SKRIPSI

Untuk Penulisan Skripsi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta



Disusun Oleh:

Nama : Alfira Putri Daneswari
Nomor Mahasiswa : 143220055
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

2025

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK MISKIN, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN
RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018–2024**

SKRIPSI



Disusun Oleh:
Nama : Alfira Putri Daneswari
Nomor Mahasiswa : 143220055
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Skripsi ini disetujui pada tanggal 2025

Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Sri Suharsih, SE, M.Si
NIP: 196912192021212008

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK MISKIN, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN
RATA-RATA LAMA SEKOLAH TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018–2024**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nama : Alfira Putri Daneswari
Nomor Mahasiswa : 143220055
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada tanggal Januari 2026

Ketua Sidang/Penguji I

Pembimbing/ Penguji II

Dr. Joko Waluyo, SE, M.Si
NIP: 197505192021211004

Dr. Sri Sukarsih, SE, M.Si
NIP: 196912192021212008

Penguji III

Penguji IV

Dr.E. Diah Luffi Wijaya, SE, M.Si
NIP: 197203112021212004

Asih Sri Winarti, SE, M.Si
NIP: 197409242021212004

Diterima dan dinyatakan sah sebagai skripsi pada tanggal 13 Maret 2026

Jurusan Ilmu Ekonomi
Ketua
Dr. E. Diah Luffi Wijayanti, SE, M.Si
NIP: 197203112021212004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfira Putri Daneswari
Nomor Mahasiswa : 143220055
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengeluaran Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2024

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dan apabila ternyata dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman dan atau sanksi peraturan yang berlaku.

Klaten, 14 Desember 2025

Yang menyatakan



Alfira Putri Daneswari

NIM. 143220055

MOTTO

“Libatkan Allah dalam Segala Urusan. Agar yang Berat Menjadi Ringan dan yang Sulit Menjadi Mudah”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis dengan penuh rasa syukur mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendoakan, mendukung, dan mendorong penulis untuk menyelesaikannya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhitung jumlahnya, telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan mudah dan lancar.
2. Orang tua dan kakak penulis, yang selalu mendoakan, memberikan perhatian, dan mendukung penuh selama proses penyusunan skripsi ini
3. Dengan kesabaran dan ketulusan, Ibu Dr. Sri Suharsih, SE, M.Si, dosen pembimbing, telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis.
4. Teman seperjuangan penulis dari Program Studi Ekonomi Pembangunan UPN "Veteran" Yogyakarta angkatan 2022, telah menjadi bagian penting dari perjalanan akademiknya.
5. Semua orang yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan dengan nama.

KATA PENGANTAR

Penulis berterima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan bimbingan Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2024”. Skripsi ini diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sri Suharsih, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
2. Kedua orang tua, Bapak dan Alm. Ibu yang telah bekerja keras, mendokan penulis sehingga sampai tahap ini.
3. Kakak perempuan tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapat dengan mudah menyelesaikan studi di Ekonomi Pembangunan ini.
4. Kakak laki-laki yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Adik yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman telah memberikan dukungan, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi penulis dan pembaca secara keseluruhan, karena mereka menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan dan diharapkan masukan dan saran untuk memperbaikinya di masa mendatang.

Klaten. 14 Desember 2025

Alfira Putri Daneswari

INTISARI

Pengangguran masih menjadi masalah besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Dibutuhkan penyelidikan menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat, karena provinsi ini merupakan salah satu daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Studi ini menyelidiki pengaruh pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan rata-rata lama sekolah terhadap TPT pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan, laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap TPT, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap TPT. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menekan TPT, sementara peningkatan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif namun tidak signifikan.

Kata kunci: Pengeluaran Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rata-rata Lama Sekolah, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

ABSTRACT

Unemployment remains a major problem for developing countries, including Indonesia. A comprehensive investigation is needed into the factors influencing the Open Unemployment Rate (TPT) in West Java, as this province has one of the highest unemployment rates in Indonesia. This study investigates the influence of per capita expenditure, the number of poor people, the population growth rate, and the average length of schooling on the TPT in 27 districts/cities in West Java Province from 2018 to 2024. The data used are secondary data obtained from publications by the Central Statistics Agency (BPS). The analytical method used is panel data regression using the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results show that per capita expenditure has a negative and significant effect on the TPT; the number of poor people has a positive and significant effect; the population growth rate has no significant effect on the TPT; and the average length of schooling has a negative but insignificant effect on the TPT. Therefore, improving community welfare remains an important factor in reducing the TPT, while increasing the average length of schooling has a negative but insignificant effect.

Keywords: *Per Capita Expenditure, Number of Poor People, Population Growth Rate, Average Years of Schooling, Open Unemployment Rate.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORI	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Pengangguran Siklikal (Keynesian)	8
2.1.2 Teori Pengangguran Ekonomi Pembangunan.....	10
2.1.3 Pengaruh Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	11
2.1.4 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	12

2.1.5	Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	13
2.1.6	Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	14
2.2	Penelitian Terdahulu	15
2.3	Kerangka Pemikiran Konseptual.....	16
2.5	Hipotesis.....	19
BAB III	METODE PENELITIAN	21
3.1	Jenis Penelitian.....	21
3.2	Data dan Sumber Data	21
3.3.	Definisi Operasional Variabel.....	22
3.4	Alat Analisis.....	24
3.4.1	Common Effect Model (CEM)	26
3.4.2	<i>Fixed Effect Model</i>	26
3.4.3	<i>Random Effect Model</i>	26
3.5	Pengujian Model Regresi Data Panel.....	27
3.5.1	Uji Chow	27
3.5.2	Uji Hausman	27
3.5.3	Uji Lagrange Multiplier	28
3.6	Uji Asumsi Klasik	28
3.6.1	Uji Normalitas	28
3.6.2	Uji Multikolinearitas	29
3.6.3	Uji Heteroskedastisitas.....	29
3.6.4	Uji Autokorelasi	30
3.7	Analisis Statistik	30
3.7.1	Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t).....	30
3.7.2	Uji Kelayakan Model (F-statistik)	32
3.7.3	Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1	Deskripsi Data.....	34

4.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	34
4.1.2	Pengeluaran per Kapita	37
4.1.3	Jumlah Penduduk Miskin.....	39
4.1.4	Laju Pertumbuhan Penduduk.....	41
4.1.5	Rata-rata Lama Sekolah	43
4.2	Analisis Data	45
4.2.1	Pengujian Model Regresi Data Panel.....	45
4.2.2	Hasil Estimasi Regresi Fixed Effect Model (FEM)	46
4.3	Uji Asumsi Klasik	49
4.3.1	Uji Normalitas	49
4.3.2	Uji Multikolinearitas	49
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	50
4.3.4	Uji Autokorelasi	50
4.4	Pengujian Hipotesis.....	51
4.4.1	Uji Parsial (Uji t).....	51
4.4.2	Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F).....	53
4.4.3	Koefisien Determinasi.....	54
4.5	Pembahasan.....	55
4.5.1	Pengaruh Pengeluaran per Kapita terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	55
4.5.2	Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	56
4.5.3	Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.....	57
4.5.4	Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN.....	64
---------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2018-2024.....	2
Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat.....	3
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Konseptual	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1 Uji Durbin-Watson	30
Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.....	42
Tabel 4.2 Pengeluaran per Kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.....	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.....	46
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.....	48
Tabel 4.5 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.....	50
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman	53
Tabel 4.8 Fixed Effects Model (FEM)	53
Tabel 4.9 Koefisien Dummy tiap Kabupaten dan Kota	55
Tabel 4.10 Uji Normalitas	56
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.13 Uji Autokorelasi	57
Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial (Uji t)	58
Tabel 4.15 Hasil Uji Simultan (Uji F)	61
Tabel 4.16 Hasil Koefisien Determinasi	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	71
Lampiran 2 Hasil Estimasi Fixed Effects Model	76
Lampiran 3 Hasil Uji Chow	77
Lampiran 4 Hasil Uji Hausman.....	78
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas	78
Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas	78
Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	79

BAB I

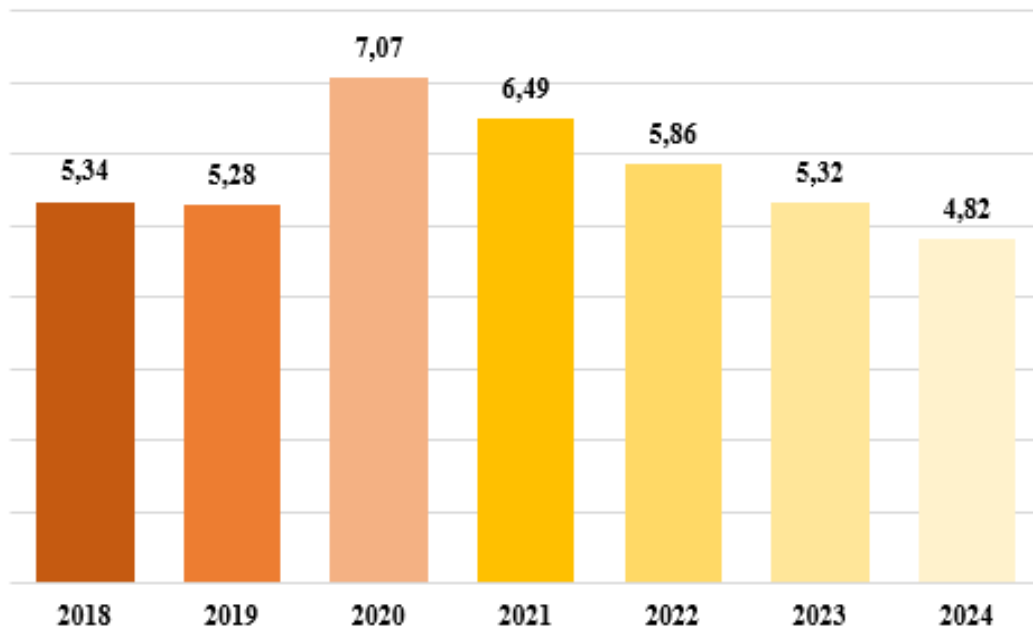
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengelola serta menyelesaikan berbagai persoalan di bidang ketenagakerjaan. Salah satu isu utama yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, adalah pengangguran. Permasalahan ini timbul akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tidak disertai peningkatan jumlah kesempatan kerja yang memadai turut memperparah kondisi pengangguran di Indonesia (Agustina et al., 2023).

Tingkat pengangguran merupakan salah satu ukuran penting yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Selain itu, indikator ini juga berperan bagi investor asing dalam menilai kondisi kesehatan perekonomian, sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka dalam melakukan investasi. Tingkat pengangguran yang rendah mencerminkan stabilitas ekonomi dan mampu meningkatkan minat investor asing. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, seperti menurunnya produktivitas nasional, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan sosial, serta memunculkan berbagai persoalan sosial lainnya. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka menjadi sangat penting sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hasil dari Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) bulan Agustus 2025 menunjukkan bahwa TPT Indonesia sebesar 4,85 persen. Artinya, dari setiap 100 orang yang terdaftar, sekitar lima orang belum mendapatkan pekerjaan tetapi masih mencari. Selain itu, data BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2025 mencapai sekitar 7,46 juta orang, TPT turun sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024 (BPS, 2025).



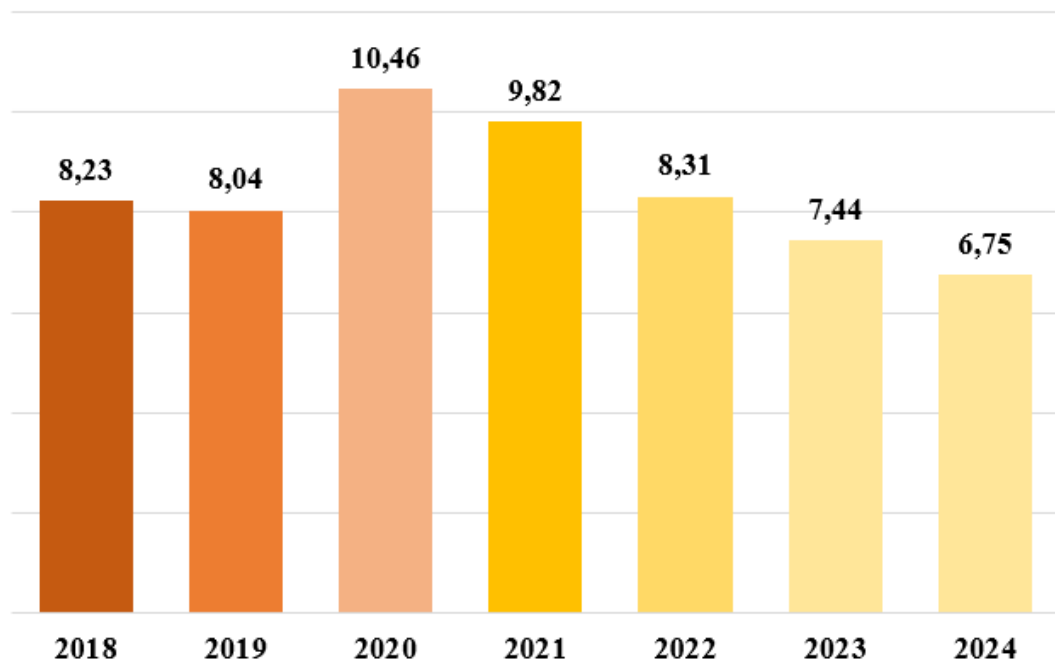
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2025, data diolah

Gambar 1. 1
Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2018-2024

Berdasarkan gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia selama periode 2018–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 dan 2019, TPT relatif stabil pada angka 5,34 persen dan 5,28 persen. Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan tajam menjadi 7,07 persen sebagai dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan mengurangi kemampuan sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja. Mulai tahun 2021, kondisi ketenagakerjaan berangsur membaik, ditandai dengan turunnya TPT menjadi 6,49 persen. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing 5,86 persen dan 5,32 persen. Pada tahun 2024, TPT kembali

menurun menjadi 4,82 persen yang menandakan berlanjutnya proses pemulihan ekonomi serta meningkatnya kapasitas pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan permasalahan dan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini telah mencatat tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, menurut data BPS. Mengingat bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbesar dan pusat industri manufaktur nasional, hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2025, data diolah

Gambar 1. 2
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024

Berdasarkan Gambar 1.2 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat sepanjang 2018–2024 mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran berada pada angka 8,23 persen dan mengalami sedikit penurunan menjadi 8,04 persen pada 2019. Namun, pada 2020 angka tersebut melonjak tajam hingga 10,46 persen akibat dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan menekan kapasitas industri dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2021, kondisi mulai menunjukkan perbaikan dengan penurunan TPT menjadi 9,82 persen. Penurunan berlanjut pada tahun 2022 dan

2023 dengan angka 8,31 persen dan 7,44 persen. Pada 2024 TPT kembali turun menjadi 6,75 persen yang menunjukkan semakin kuatnya proses pemulihan ekonomi dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Meskipun menunjukkan tren penurunan, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat dibandingkan provinsi lain menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasar kerja masih cukup besar dan memerlukan perhatian khusus. Urgensi penelitian mengenai Jawa Barat semakin kuat mengingat provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbesar serta struktur ekonomi yang ditopang oleh sektor industri manufaktur, sehingga perubahan kondisi ekonomi baik domestik maupun global sangat memengaruhi kemampuan provinsi ini dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, penelitian terkait pengangguran di Jawa Barat masih relatif terbatas, terutama yang menganalisis faktor-faktor makroekonomi secara komprehensif dan menggunakan pendekatan dinamika ekonomi regional. Mayoritas penelitian terdahulu bersifat statis sehingga belum mampu menggambarkan perubahan variabel ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga terdapat *research gap* yang perlu diisi melalui penelitian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2018–2024.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah, serta guna memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran per kapita terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024?

3. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024?
4. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran per kapita terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024.
2. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024.
3. Menganalisis pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024.
4. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota provinsi Jawa Barat tahun 2018-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik khususnya tentang masalah yang terkait dengan pengeluaran per kapita, laju pertumbuhan penduduk, dan rata rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran per kapita, menurunkan jumlah penduduk miskin, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan rata-rata lama sekolah guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

1.5. Keaslian Penelitian

Bagian ini memuat dasar pengembangan penelitian dan penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan sebelum membandingkannya dengan penelitian saat ini. Keaslian penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, akan ditemukan titik-titik yang menunjukkan bahwa penelitian ini asli.

Tabel 1.1 menunjukkan temuan deskripsi penelitian sebelumnya:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Sampel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Agustina. M., et al. (2023)	Indonesia, 2012–2021	Regresi data panel	Indeks pembangunan manusia, inflasi, upah minimum, jumlah tenaga kerja, serta pengangguran berpengaruh signifikan terhadap TPT di Indonesia.
2.	Sutrisno. Y. R., & Arifin. Z. (2024)	Kabupaten/ Kota Provinsi Bali, 2017–2021	Regresi data panel	Pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap TPT di Provinsi Bali.
3.	Johar. M. R., Suharno. & Istiqomah. (2022)	Provinsi Banten, 2012–2020	Analisis jalur (<i>Path Analysis</i>)	Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap TPT dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi parsial.

Lanjutan Tabel 1.1

No	Peneliti	Sampel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
4.	Lestari. I. D., & Nilasari. A (2025)	Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat 2018–2022	Regresi data panel	Laju pertumbuhan penduduk negative dan signifikan terhadap TPT.
5.	Wulandari. F., et al. (2024)	Kabupaten/ Kota Provinsi Banten, 2020–2023	Regresi data panel	Jumlah penduduk miskin dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap TPT, sedangkan upah minimum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Penelitian tambahan diperlukan untuk memperbaiki penelitian sebelumnya karena kekurangan dalam penjelasan teori, masalah, data, dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal variabel, ruang lingkup, dan periode yang digunakan. Penelitian sebelumnya biasanya hanya memperhatikan satu atau dua variabel, tetapi penelitian ini menggabungkan pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan rata-rata lama sekolah secara bersamaan dengan tingkat pengangguran terbuka. Fokus penelitian adalah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan yang kompleks. Dalam hal waktu, penelitian ini mencakup tahun 2018–2024, yang mencakup periode sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini disusun untuk memberikan dasar konseptual dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka, dengan variabel independen berupa pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan rata-rata lama sekolah. Penelitian ini menggunakan teori pengangguran siklikal Keynesian dan teori pengangguran dalam ekonomi pembangunan Todaro sebagai kerangka untuk memahami mekanisme terjadinya pengangguran. Variabel-variabel yang diteliti diyakini dapat memengaruhi tingkat pengangguran baik melalui perubahan permintaan agregat maupun melalui dinamika penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi, sehingga pemahaman terhadap kedua teori ini penting untuk menganalisis hubungan antara pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan penduduk, pendidikan terhadap pengangguran.

2.1.1 Teori Pengangguran Siklikal (Keynesian)

Dalam teori makroekonomi Keynesian yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes (1936), tingkat pengangguran dalam suatu perekonomian sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan agregat (AD). Secara umum, tingkat pengangguran (U) dapat dinyatakan sebagai fungsi dari permintaan agregat:

$$U = f(AD) \dots\dots\dots (2.1)$$

Artinya, tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan permintaan agregat, sehingga:

$$\frac{\partial U}{\partial AD} < 0 \dots\dots\dots (2.2)$$

Semakin tinggi permintaan agregat, semakin banyak tenaga kerja yang terserap dan tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, apabila permintaan

agregat rendah, tenaga kerja yang tersedia tidak terserap sepenuhnya sehingga pengangguran meningkat (Blanchard & Leigh, 2020)

Dalam bentuk linier sederhana, hubungan ini dapat ditulis sebagai:

$$U = \alpha - \beta AD \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana U adalah tingkat pengangguran, AD adalah permintaan agregat, α konstanta, dan β koefisien yang menunjukkan seberapa besar perubahan AD memengaruhi pengangguran ($\beta > 0$).

Permintaan agregat (AD) sendiri merupakan total permintaan terhadap seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. AD mencerminkan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri, untuk membeli barang dan jasa. Permintaan agregat berperan penting dalam menentukan tingkat output nasional dan kesempatan kerja karena perubahan AD langsung memengaruhi tingkat produksi dan kebutuhan tenaga kerja dalam perekonomian (Auerbach et al., 2021).

Secara matematis, permintaan agregat dapat ditunjukkan melalui persamaan:

$$AD = C + I + G + (X - M) \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana C adalah konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, dan $(X - M)$ ekspor neto. Persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, serta perdagangan internasional. Peningkatan AD mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja (Auerbach et al., 2021).

Hubungan permintaan agregat dengan tingkat pengangguran dapat dirumuskan secara lebih spesifik melalui fungsi konsumsi:

$$U = \alpha - \beta C \dots\dots\dots (2.5)$$

Dimana U adalah tingkat pengangguran, C adalah konsumsi rumah tangga, α merupakan konstanta, dan β koefisien yang menunjukkan pengaruh konsumsi terhadap pengangguran. Dalam penelitian ini, konsumsi diproksikan menggunakan pengeluaran per kapita, yang mencerminkan rata-rata pengeluaran masyarakat terhadap barang dan jasa. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, konsumsi masyarakat meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, produksi meningkat, dan penyerapan tenaga kerja juga meningkat sehingga tingkat pengangguran menurun (Purwahendra & Sihombing, 2025).

2.1.2 Teori Pengangguran Ekonomi Pembangunan

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi oleh negara berkembang dalam proses pembangunan ekonomi. Pengangguran tidak hanya berkaitan dengan rendahnya aktivitas ekonomi, tetapi juga dengan ketidakseimbangan antara pertumbuhan kesempatan kerja dan pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. Menurut teori pengangguran dalam ekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro (1970), pengangguran tidak hanya disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja, sehingga penduduk miskin yang memiliki pendidikan rendah sulit terserap di sektor formal. Tingkat pendidikan yang terbatas memperburuk kondisi ini karena tenaga kerja miskin kurang memenuhi persyaratan keterampilan yang dibutuhkan sektor modern. Akibatnya, penganggurannya tetap tinggi meskipun ada pertumbuhan ekonomi di sektor industri atau jasa, terutama di kota-kota besar (Todaro & Smith, 2015).

Tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta kemampuan individu dalam beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga dapat

meningkatkan peluang tenaga kerja untuk terserap dalam pasar kerja (Hanushek et al., 2020).

Jumlah penduduk miskin memengaruhi tingkat pengangguran karena penduduk miskin memiliki akses pendidikan dan keterampilan yang terbatas, sehingga kualitas sumber daya manusia rendah dan produktivitas kerja menurun. Kondisi ini membuat mereka sulit terserap di sektor formal atau modern, sehingga penganggurannya tetap tinggi (Purwahendra & Sihombing, 2025)

Secara konseptual, hubungan antara tingkat pengangguran dengan jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk dan rata-rata lama sekolah dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut:

$$U = f(\text{Poor Population}, PG, EDU) \dots\dots\dots (2.6)$$

Dimana U adalah tingkat pengangguran, *Poor Population* adalah jumlah penduduk miskin, PG adalah laju pertumbuhan penduduk, dan EDU adalah tingkat pendidikan. Dalam penelitian ini, variabel PG diproksikan menggunakan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan variabel EDU diproksikan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang berpotensi meningkatkan jumlah angkatan kerja. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta peluang tenaga kerja untuk terserap dalam pasar kerja (Johar, 2023).

2.1.3 Pengaruh Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Pengeluaran per kapita menunjukkan rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bentuk konsumsi barang dan jasa. Tingkat pengeluaran per kapita yang lebih tinggi mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang lebih baik serta menunjukkan

meningkatnya aktivitas konsumsi dalam perekonomian. Aktivitas konsumsi masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong pergerakan kegiatan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu komponen utama dalam permintaan agregat. Peningkatan pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar dalam melakukan konsumsi sehingga aktivitas transaksi barang dan jasa dalam perekonomian juga meningkat.

Menurut (Keynes, 1936), konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam permintaan agregat suatu perekonomian. Peningkatan konsumsi masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di pasar yang kemudian mendorong perusahaan untuk meningkatkan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Peningkatan aktivitas produksi berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dalam proses produksi sehingga kesempatan kerja menjadi lebih luas dan penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian juga meningkat. Peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut berkaitan dengan menurunnya jumlah pengangguran dalam perekonomian. Dalam penelitian ini, konsumsi diprosikan menggunakan pengeluaran per kapita, yang mencerminkan rata-rata pengeluaran masyarakat terhadap barang dan jasa. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, maka konsumsi masyarakat akan meningkat sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Kondisi tersebut mendorong peningkatan produksi oleh perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Secara empiris, penelitian oleh Purwahendra dan Sihombing (2024) menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

2.1.4 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penduduk miskin menunjukkan banyaknya penduduk yang memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja. Kondisi kemiskinan menyebabkan

individu memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah. Keterbatasan tersebut mengakibatkan penduduk miskin memiliki daya saing yang lebih rendah di pasar tenaga kerja, terutama dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal yang mensyaratkan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Kondisi ini menyebabkan sebagian penduduk miskin mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

Hal tersebut sejalan dengan teori pengangguran dalam ekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2015) yang menjelaskan bahwa pengangguran di negara berkembang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan sektor modern. Penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan umumnya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah sehingga sulit terserap dalam sektor formal yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Kondisi ini menyebabkan sebagian penduduk miskin tidak memperoleh pekerjaan dan berada dalam kondisi pengangguran terbuka.

Secara empiris, penelitian oleh Sari dan Putra (2021) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Penelitian lain oleh Hidayat et al. (2023) juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan meningkatkan kemungkinan terjadinya pengangguran karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan kesempatan kerja yang tersedia. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin diduga berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2.1.5 Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertambahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang memasuki pasar tenaga kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah angkatan kerja yang mencari

pekerjaan. Apabila peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, maka sebagian tenaga kerja tidak dapat terserap dalam kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan tingkat pengangguran terbuka.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori pengangguran dalam ekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2015). Dalam proses pembangunan ekonomi di negara berkembang, pertumbuhan jumlah tenaga kerja seringkali lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak dapat terserap secara optimal dalam kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan tingkat pengangguran. Secara empiris, penelitian oleh Sari dan Putra (2021) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Penelitian lain oleh Hidayat et al. (2023) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi meningkatkan tekanan di pasar tenaga kerja, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk diduga berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2.1.6 Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik karena individu memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang lebih besar dalam melakukan kegiatan produktif. Dalam ekonomi pembangunan, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendukung proses pembangunan ekonomi.

Menurut Todaro dan Smith (2015), peningkatan pendidikan masyarakat akan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan karena memiliki kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Secara empiris, penelitian oleh Putri dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Penelitian lain oleh Rahman et al. (2023) juga menemukan bahwa peningkatan tingkat pendidikan penduduk mampu menurunkan pengangguran terbuka melalui peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Dengan demikian, rata-rata lama sekolah diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Agustina et al., (2023) meneliti pengaruh indeks pembangunan manusia, inflasi, upah minimum, jumlah tenaga kerja, serta pengangguran terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 2012–2021. Dengan menggunakan regresi data panel dinamis (*GMM Arellano-Bond*), hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Sutrisno & Arifin (2023) menganalisis faktor-faktor tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali dengan sampel kabupaten/kota periode 2017–2021. Metode yang digunakan adalah regresi data panel (*Fixed Effect Model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali.

Johar (2023) melakukan penelitian mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten periode 2012–2020. Penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian menemukan

bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, dengan pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel mediasi parsial.

Rafli et al., (2024) meneliti pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banjar periode 2017–2022. Dengan menggunakan regresi linier sederhana berdasarkan konsep *Okun's Law*, hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sehingga *Okun's Law* tidak berlaku di Kabupaten Banjar.

Wulandari et al., (2024) menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten periode 2020–2023. Penelitian ini menggunakan regresi data panel (*Fixed Effect Model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sedangkan upah minimum berpengaruh positif namun tidak signifikan.

2.3 Kerangka Pemikiran Konseptual

Studi ini berbasis pada asumsi bahwa empat komponen utama mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, yaitu pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan rata-rata lama sekolah. Keempat variabel tersebut berperan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menjadi variabel dependen. Seluruh variabel dianalisis menggunakan metode regresi data panel untuk mengetahui bagaimana masing-masing variabel berdampak dan seberapa signifikan mereka terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

Variabel pertama adalah pengeluaran per kapita dijelaskan dalam kerangka Teori Keynesian, yang menekankan bahwa tingkat pengangguran sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat (AD). Menurut Keynes (1936), pengangguran terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa tidak cukup kuat untuk

menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia. Semakin tinggi AD, semakin besar produksi yang dilakukan perusahaan, sehingga tenaga kerja terserap lebih banyak dan pengangguran menurun. Dalam penelitian ini, pengeluaran per kapita diproyeksikan sebagai indikator konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama AD. Dengan meningkatnya pengeluaran per kapita, konsumsi masyarakat juga meningkat. Peningkatan konsumsi tersebut mendorong bertambahnya permintaan agregat dalam perekonomian. Kondisi ini kemudian memacu perusahaan untuk meningkatkan produksi, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi lebih tinggi dan tingkat pengangguran menurun. (Purwahendra & Sihombing, 2025).

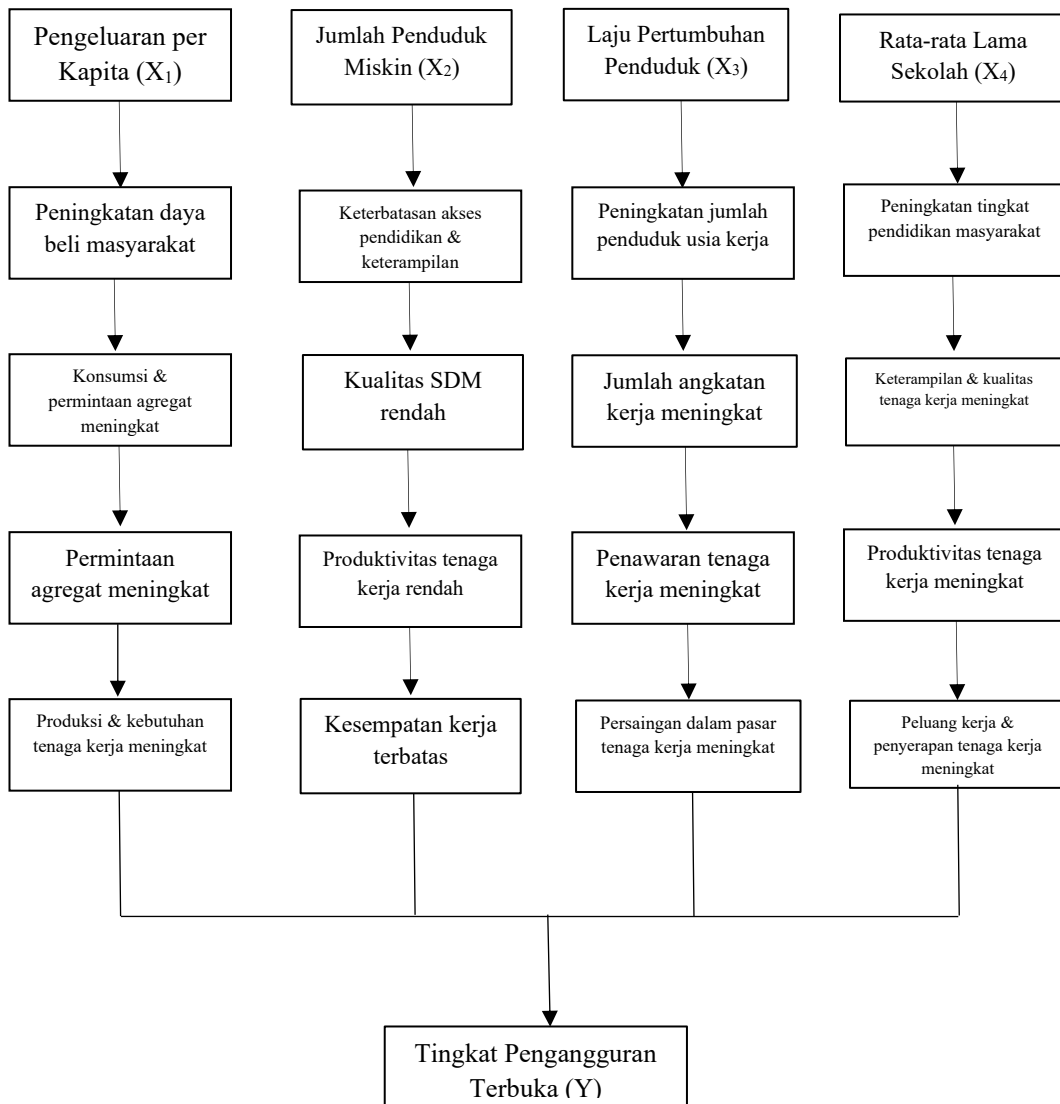
Variabel kedua yaitu jumlah penduduk miskin, yang menunjukkan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Tingginya jumlah penduduk miskin umumnya terkait dengan rendahnya sumber daya manusia dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas produktif dan daya saing kelompok miskin di pasar kerja formal menjadi lemah, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka mengalami pengangguran. Secara ekonomi, hubungan ini dapat dijelaskan melalui Teori Kemiskinan Struktural menurut Todaro & Smith (2020), yang menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga lahir dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, keterampilan, modal, dan kesempatan kerja. Keterbatasan tersebut membatasi kemampuan individu untuk bersaing di pasar kerja yang kompetitif, sehingga mendorong meningkatnya pengangguran. Teori Pasar Tenaga Kerja Dualistik relevan karena menjelaskan bahwa penduduk miskin cenderung terserap di sektor informal yang bercirikan pendapatan rendah, produktivitas terbatas, dan ketidakstabilan kerja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pengangguran terselubung yang pada akhirnya memperkuat tekanan terhadap TPT ketika sektor formal tidak mampu menyerap tenaga kerja dari kelompok miskin secara optimal (Wulandari et al., 2024).

Variabel ketiga adalah laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan seberapa cepat jumlah penduduk dalam suatu wilayah

meningkat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menambah jumlah orang yang memasuki angkatan kerja. Jika penciptaan lapangan kerja tidak mampu mengikuti pertumbuhan angkatan kerja, sebagian tenaga kerja tidak terserap dan pengangguran meningkat. Kondisi ini sejalan dengan Teori Pengangguran dalam Ekonomi Pembangunan Todaro, yang menyatakan bahwa pengangguran di negara berkembang muncul karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Dengan demikian, secara teoritis terdapat hubungan positif antara laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran terbuka, karena semakin cepat pertumbuhan penduduk, tekanan pada pasar tenaga kerja semakin besar dan risiko kelebihan tenaga kerja meningkat (Lestari & Nilasari, 2025).

Variabel keempat adalah rata-rata lama sekolah (RLS). Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar peluang individu memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja. Kondisi ini sesuai dengan Teori Pengangguran dalam Ekonomi Pembangunan Todaro, yang menekankan bahwa kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sangat menentukan kemampuan terserapnya tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi. Sebaliknya, rendahnya rata-rata lama sekolah mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga meningkatkan risiko pengangguran karena keterbatasan keterampilan dan rendahnya daya saing tenaga kerja. Dengan demikian, secara teoritis, RLS memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran terbuka (Soleha & Faizin, 2023).

Dengan mempertimbangkan uraian tersebut, disusun kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Konseptual

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah perkiraan awal tentang hasil penelitian yang masih bersifat sementara, dan kebenarannya akan diuji setelah data empiris dari lapangan diperoleh. Oleh karena itu, hipotesis mungkin benar atau salah tergantung pada hasil pengujian.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan landasan pemikiran teoritis dan temuan studi empiris yang relevan dalam bidang ini:

1. Diduga pengeluaran per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2024.
2. Diduga jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2024.
3. Diduga laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2024.
4. Diduga rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif ini adalah pendekatan ilmiah yang memanfaatkan data angka untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengukuran variabel secara objektif dengan menggunakan instrumen yang baku, sehingga hasilnya dapat dianalisis melalui teknik statistik. Proses penelitian ini dilakukan secara terstruktur, mulai dari perumusan masalah, penyusunan hipotesis, dan analisis hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif membantu kita memahami lebih baik hubungan antarvariabel dan seberapa signifikan mereka dalam peristiwa sosial dan ekonomi (Berlianti et al., 2024).

Creswell (2018) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menguji teori dengan cara mengukur hubungan antarvariabel yang dapat dikuantifikasikan, dianalisis secara numerik, dan menghasilkan pola atau generalisasi yang dapat menjelaskan peristiwa. Dengan demikian, penelitian kuantitatif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antarvariabel serta tingkat signifikansinya dalam hal peristiwa sosial dan ekonomi. Penelitian murni adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan tanpa berusaha memecahkan masalah praktis. Tujuan utama dari penelitian murni adalah menemukan konsep, prinsip, atau teori baru yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang telah tersedia sebelumnya dan dapat digunakan untuk kepentingan penelitian disebut data sekunder. Dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari lembaga resmi, diharapkan hasil penelitian akan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Pratiwi & Wulansari, 2020). Data yang

digunakan meliputi pengeluaran per kapita, laju pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS) berbagi data ini.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini menggunakan 4 variabel (independen) dan 1 variabel (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan variabel dependen adalah tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu untuk memperjelas dan mempermudah memahami variabel-variabel yang akan digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini, maka berikut dapat dirumuskan definisi operasional variabel, yaitu:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan TPT adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau bersedia untuk bekerja jika ada kesempatan. Indikator ini merupakan salah satu ukuran penting untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah dan menunjukkan kondisi ketenagakerjaan. Data TPT periode 2018–2024 digunakan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari publikasi resmi BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dengan demikian, (Manihuruk & Suhianto, 2024) juga menggunakan TPT sebagai variabel penelitian. TPT didefinisikan sebagai persentase pengangguran terbuka berdasarkan data BPS. Dalam penelitian tentang pengaruh IPM, TPT, dan UMR terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia, mereka menggunakan TPT sebagai variabel penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, TPT dioperasionalkan sebagai persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja di Indonesia. Satuan tingkat pengangguran terbuka adalah persen (%).

2. Pengeluaran per Kapita

Salah satu cara penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pengeluaran per kapita. Kemampuan sebuah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pangan maupun non-pangan, sebanding dengan peningkatan pengeluaran per kapita. Data pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2018–2024. Menurut Sukirno (2020), peningkatan pengeluaran per kapita menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah peluang kerja, sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Satuan dari pengeluaran per kapita adalah ribu (rupiah).

3. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin menurut BPS adalah istilah yang mengacu pada banyaknya orang atau kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin seringkali menghadapi keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap lapangan kerja. Variabel ini menggunakan data jumlah penduduk miskin periode 2018–2024 yang bersumber dari publikasi BPS. Menurut Putri (2021), tingginya jumlah penduduk miskin dapat memperbesar potensi meningkatnya tingkat pengangguran terbuka karena kelompok ini cenderung memiliki keterampilan rendah sehingga daya saingnya di pasar tenaga kerja juga terbatas. Satuan dari jumlah penduduk miskin adalah jiwa.

4. Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat suatu wilayah mengalami peningkatan penduduknya dalam jangka waktu tertentu adalah laju pertumbuhan penduduknya. Laju yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah penduduk wilayah tersebut meningkat lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya. Jika tidak diimbangi dengan lebih banyak kesempatan kerja, kondisi ini dapat menimbulkan tekanan pada

pasar tenaga kerja. Meskipun pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka akan cenderung meningkat apabila penyerapan tenaga kerja berjalan lambat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS (2023), pengendalian laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk usia kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga dapat menekan tingkat pengangguran terbuka. Satuan dari jumlah penduduk miskin adalah persen (%).

5. Rata-rata Lama Sekolah

Untuk orang usia 15 tahun ke atas, rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun pendidikan formal yang mereka habiskan. Dengan menggunakan indikator ini, kita dapat mengetahui seberapa tinggi pendidikan masyarakat di suatu daerah. Data tentang durasi sekolah rata-rata yang terlibat dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi BPS tahun 2018–2024. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa lama sekolah rata-rata menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi, yang berarti masyarakat memiliki keterampilan dan kemampuan yang lebih baik, yang meningkatkan peluang terserap di pasar kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Jumlah penduduk miskin dikalikan dengan tahun. Satuan dari rata-rata lama sekolah adalah tahun.

3.4 Alat Analisis

Regresi data panel adalah teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Ada sejumlah keunggulan yang mendasari pemilihan pendekatan ini. Pertama, data panel, yang merupakan kombinasi dari data rangkaian waktu dan *cross-section*, memiliki kapasitas untuk menghasilkan jumlah observasi yang lebih besar,

yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kebebasan. Kedua, penggabungan kedua jenis data memungkinkan analisis yang lebih mendalam sekaligus dapat mengurangi masalah yang muncul karena variabel yang terabaikan (*omitted variable*) (Widarjono, 2018). Data panel memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan data *time series* dan *cross-section* yang berdiri sendiri (Gujarati & Porter, 2013). Data panel dapat memberikan informasi yang lebih kaya dan variatif, memberikan gambaran yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, menggunakan data panel juga dapat mengurangi kemungkinan masalah multikolinearitas antar variabel, meningkatkan efisiensi estimasi karena jumlah observasi yang lebih banyak, dan memungkinkan peneliti untuk melihat dinamika perubahan yang tidak dapat dilihat jika hanya menggunakan satu jenis data.

Data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) digabungkan untuk membentuk data panel. Data *cross-section* yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tahun 2018–2024. Perangkat lunak *Eviews 12*, yang didukung oleh *Microsoft Excel 365*, digunakan untuk mengolah data. Sebagai berikut, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \beta_3 x_{3it} + \beta_4 x_{4it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan: +

- Y : Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
- X₁ : Pengeluaran per Kapita (Ribuan Rupiah)
- X₂ : Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
- X₃ : Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)
- X₄ : Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
- β₀ : Konstanta
- β₁ – β₄ : Koefisien Regresi
- i : *Cross Section*
- t : *Time Series*
- ε_{it} : Komponen *error* pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

Tiga model efek umum *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel.

3.4.1 Common Effect Model (CEM)

Pendekatan paling sederhana untuk regresi data panel adalah *Common Effect Model (CEM)*, juga dikenal sebagai *Pooled Least Square (PLS)*. Model ini menggabungkan data *cross-section* dan *time series* tanpa memperhitungkan perbedaan karakteristik individu dan waktu. Dengan kata lain, CEM mengasumsikan bahwa perilaku setiap unit observasi sama, sehingga semua data diperlakukan homogen. Kelemahan dari model ini adalah potensi munculnya bias apabila terdapat perbedaan signifikan antar individu atau antar waktu yang diabaikan (Gujarati & Porter, 2013).

3.4.2 Fixed Effect Model

Dengan menggunakan *intercept* yang berbeda untuk setiap unit observasi, *Fixed Effect Model (FEM)* memungkinkan adanya perbedaan karakteristik antar individu atau antar waktu. Dengan pendekatan ini, variabel dummy digunakan untuk menangkap efek khusus yang melekat pada individu atau waktu. FEM sangat bermanfaat ketika peneliti meyakini bahwa ada faktor spesifik yang tidak berubah sepanjang waktu namun memengaruhi variabel dependen. Model ini dapat mengatasi bias yang ditimbulkan oleh variabel yang terabaikan (*omitted variable*) yang bersifat tetap.

3.4.3 Random Effect Model

Tujuan menambahkan variabel dummy ke model *Fixed Effect* adalah untuk menggambarkan ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga mengakibatkan pengurangan tingkat kebebasan (*degree of freedom*), yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Salah satu cara untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan metode *Random Effect*, yang mengestimasi data panel di mana variabel gangguan dapat berhubungan satu sama lain antara individu dan waktu (Gujarati & Porter, 2012).

3.5 Pengujian Model Regresi Data Panel

Serangkaian uji seperti Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) diperlukan untuk memilih model regresi data panel yang tepat.

3.5.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Common Effect Model* (CEM) adalah model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel. Dalam pengujian ini dapat ditentukan hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 = Jika *Chi Square* $> 0,05$ maka model yang tepat ada pada *Common Effect*.

H_1 = Jika *Chi Square* $< 0,05$ maka model yang tepat ada pada *Fixed Effect*.

Adapun keputusan untuk mengetahui apakah menolak atau menerima H_0 adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas *Cross Section F* $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima dan model yang digunakan yaitu *Common Effect*.
2. Jika nilai probabilitas *Cross Section F* $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan model yang digunakan yaitu *Fixed Effect*.

3.5.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian ini dilakukan apabila hasil Uji Chow menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih sesuai. Tujuan utama dari Uji Hausman adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara error dalam model dengan satu atau lebih variabel independen, berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam uji ini:

H_0 = Jika nilai probabilitas atau *Cross Section random* $> 0,05$ maka model yang tepat yaitu *Random Effect*.

H_1 = Jika nilai probabilitas atau *Cross Section random* $< 0,05$ maka model yang tepat yaitu *Fixed Effect*.

1. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* yang diperoleh pada uji hausman lebih besar dari α (0,05) maka H_0 diterima H_1 ditolak, artinya model yang tepat dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

2. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* yang diperoleh kurang dari alpha (0,05) maka H_0 ditolak H_1 diterima, artinya model yang tepat dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

3.5.3 Uji Lagrange Multiplier

Untuk menentukan model yang paling tepat antara *Random Effect Model (REM)* dan *Common Effect Model (CEM)*. Berikut hipotesisnya:

H_0 = Jika *Chi Square* > 0,05 maka model yang tepat ada pada *Common Effect*.

H_1 = Jika *Chi Square* < 0,05 maka model yang tepat ada pada *Random Effect*.

Adapun keputusan untuk mengetahui apakah menolak atau menerima H_0 adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas *Chi Square* yang diperoleh pada uji LM > alpha (0,05) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya model yang tepat digunakan yaitu *Common Effect*.
2. Jika nilai probabilitas *Chi Square* yang diperoleh pada uji LM < alpha (0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model yang tepat digunakan yaitu *Random Effect*.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik. Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari berbagai pelanggaran asumsi klasik. Untuk mencegah deviasi dari asumsi klasik, Gujarati (2012) mengatakan bahwa analisis regresi linier berganda membutuhkan beberapa tes:

3.6.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi memenuhi asumsi distribusi normal. Asumsi ini penting karena uji statistik seperti uji t dan uji F bergantung pada asumsi bahwa residual berdistribusi normal dalam analisis regresi. Jika residual tidak normal, hasil estimasi dapat menjadi tidak akurat dan kesimpulan penelitian dapat dianggap tidak valid. Salah

satu metode yang paling umum adalah Jarque–Bera, yang didasarkan pada nilai *skewness* (kemencengan distribusi) dan *kurtosis* (tingkat keruncingan distribusi) dari residual. Hasil penelitian memberikan nilai statistik Jarque–Bera serta probabilitasnya. Kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan adalah:

1. Jika nilai probabilitas *Jarque–Bera* lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), maka residual berdistribusi normal sehingga asumsi klasik terpenuhi.
2. Jika nilai probabilitas *Jarque–Bera* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05) maka residual tidak berdistribusi normal yang berarti ada pelanggaran terhadap asumsi normalitas.

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Jika ada korelasi yang tinggi antar variabel bebas, ini dapat menjadi masalah karena akan memengaruhi kestabilan estimasi parameter dan keakuratan interpretasi hasil penelitian. Multikolinearitas yang serius dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak signifikan meskipun nilai R^2 tinggi. Akibatnya, variabel bebas yang seharusnya berpengaruh tampaknya tidak berpengaruh. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), juga dikenal sebagai matriks korelasi antar variabel, nilai VIF di bawah 10 menunjukkan tidak adanya Multikolinearitas yang signifikan. Oleh karena itu, pengujian Multikolinearitas sangat penting untuk memastikan bahwa hasil regresi panel tetap valid (Gujarati & Porter, 2013).

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah ada perbedaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Kondisi yang sama disebut homoskedastisitas jika *varians residual* antar pengamatan sama, sedangkan jika variansnya berbeda disebut Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi yang tidak efektif meskipun parameter regresi tidak bias. Oleh karena itu, Heteroskedastisitas tidak seharusnya terjadi pada model regresi yang baik. Beberapa metode pengujian yang umum digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas termasuk uji Glejser, White, dan Breusch

Pagan. Jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada Heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas lebih rendah dari α , maka model regresi mengalami Heteroskedastisitas. Oleh karena itu, Heteroskedastisitas harus dihindari agar model regresi dapat diinterpretasikan dengan baik dan menghasilkan hasil estimasi yang efektif (Gujarati & Porter, 2013).

3.6.4 Uji Autokorelasi

Dalam model regresi, uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan sistematis antara nilai residual pada satu peristiwa dan nilai residual pada peristiwa lain. Metode Durbin Watson, seperti yang dijelaskan oleh Gujarati dan Porter (2012), digunakan untuk melakukan pengujian dalam penelitian ini.

Hipotesis berikut digunakan untuk melakukan pengujian:

1. Persamaan hipotesa:

H_0 = tidak ada autokorelasi

H_1 = ada autokorelasi

2. Landasan keputusan sesuai dengan tabel yaitu:

Tabel 3. 1 Uji Durbin-Watson

Nilai Statistik d	Hasil
$0 < d < d_L$	Menentang H_0 , autokorelasi positif
$d_L < d < d_U$	Keragu-raguan, tanpa keputusan
$d_U < d < 4 - d_L$	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif, menerima H_0
$4 - d_U < d < 4 - d_L$	Keragu-raguan, tanpa keputusan
$4 - d_L < d < 4$	Menentang H_0 , autokorelasi negatif

Sumber: Gujarati, 2012

3.7 Analisis Statistik

3.7.1 Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Sejauh mana masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial diukur dengan uji t. Uji t ini bertujuan untuk mengetahui apakah beberapa faktor, termasuk jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Hipotesis satu sisi digunakan dalam pengujian untuk mengevaluasi arah

dan signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

- $H_0: \beta_1 = 0$, variabel pengeluaran per kapita tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.
- $H_0: \beta_1 < 0$, variabel pengeluaran per kapita berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.
- $H_0: \beta_1 = 0$, variabel jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.
- $H_0: \beta_1 > 0$, variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.
- $H_0: \beta_1 = 0$, variabel laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.
- $H_0: \beta_1 < 0$, variabel laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.
- $H_0: \beta_1 = 0$, variabel rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.
- $H_0: \beta_1 < 0$, variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

Formulasi dalam mencari t_{tabel} adalah:

$$t_{\text{tabel}} = t_{\alpha}; n - k \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

- t_{α} = Tingkat Signifikansi
- n = Jumlah sampel
- k = Jumlah variabel dependen dan independen

Formula dalam mencari $t_{\text{statistik}}$ adalah:

$$t = \frac{\beta_1}{se(\beta_1)} \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan:

- β_1 = Koefisien Regresi
- $se(\beta_1)$ = Standar error β_1

Kriteria pengujian dengan $\alpha=5\%$

1. Jika $t_{\text{statistik}} < t_{\text{tabel}}$ atau $Prob_{\text{hitung}} > Prob_{\text{critical value}}$ maka H_0 diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{\text{statistik}} > t_{\text{tabel}}$ atau $Prob_{\text{hitung}} < Prob_{\text{critical value}}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji Kelayakan Model (F-statistik)

Uji kelayakan model digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah beberapa faktor, termasuk jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita, secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Hipotesis yang diuji tentang kelayakan model tersebut adalah sebagai berikut:

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, maka semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, maka semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Formulasi dalam mencari F_{tabel} adalah:

$$F_{\text{tabel}} = F_{\alpha; n - k; k - 1} \dots \dots \dots (3.4)$$

F_{α} = Tingkat Signifikansi

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel dependen dan independent

Formula dalam mencari $F_{\text{statistik}}$ adalah:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/N-k} \dots \dots \dots (3.5)$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

N = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel dependen dan independen

Kriteria pengujian dengan $\alpha=5\%$

1. Jika $F_{\text{statistik}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.7.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, dan semakin tinggi nilainya semakin banyak variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, sehingga model dinilai lebih baik. Di sisi lain, nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen hanya dapat menjelaskan sebagian kecil dari variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi resmi lembaga pemerintah. Jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sakernas, yang dipublikasikan setiap tahun. Variabel pengeluaran per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Pengeluaran per Kapita Menurut Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Variabel jumlah penduduk miskin diperoleh dari publikasi tahunan mengenai profil kemiskinan di Indonesia, dan variabel laju pertumbuhan penduduk diperoleh dari data jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang dipublikasikan oleh BPS. Dengan menggunakan *software EViews 12*, penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di beberapa kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2024. Tingkat pengangguran terbuka berperan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan rata-rata lama sekolah semua berperan sebagai variabel

4.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja tetapi gagal mendapatkan pekerjaan. Jenis pengangguran ini sangat tinggi karena pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, yang mengakibatkan pengangguran yang berkepanjangan dan penurunan produktivitas. Jika seseorang tidak memiliki pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, mereka dianggap pengangguran terbuka (Dainty et al., 2020). Dalam penelitian ini, variabel tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan

menggunakan data persentase tingkat pengangguran total (TPT) pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018–2024.

Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2024 (Persen)

Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Bandung	9,83	9,11	14,29	12,22	10,64	8,47	7,34
Kab. Bekasi	10,23	9,81	11,05	9,32	8,41	7,71	5,99
Kab. Bogor	5,07	5,51	8,58	8,32	6,98	6,52	6,36
Kab. Ciamis	7,12	7,35	8,96	8,68	7,60	7,33	6,96
Kab. Cianjur	6,92	6,31	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74
Kab. Cirebon	4,64	5,16	5,66	5,06	3,75	3,52	3,37
Kab. Garut	9,10	9,68	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78
Kab. Indramayu	10,64	10,35	11,52	10,38	8,11	7,65	6,74
Kab. Karawang	5,00	4,37	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01
Kab. Kuningan	8,57	8,49	12,17	10,78	8,83	8,53	8,34
Kab. Majalengka	8,05	8,18	11,19	11,46	9,55	8,83	7,40
Kab. Purwakarta	9,14	8,30	10,68	10,88	8,81	7,90	7,82
Kab. Subang	6,66	6,12	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
Kab. Sukabumi	8,00	8,09	13,30	13,07	10,77	10,52	8,97
Kab. Sumedang	6,89	6,78	7,99	7,66	6,62	6,55	6,49
Kab. Tasikmalaya	9,74	9,16	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
Kota Bandung	7,54	7,70	9,89	9,18	7,72	6,94	6,16
Kota Bekasi	8,71	8,68	9,48	9,77	7,77	7,65	6,73
Kota Bogor	9,94	9,73	11,07	10,70	8,75	7,72	7,34
Kota Cirebon	9,74	9,00	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82
Kota Depok	8,55	8,24	12,25	11,65	9,63	8,11	6,70
Kota Sukabumi	3,59	4,52	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
Kota Tasikmalaya	9,74	9,16	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
Kota Cimahi	9,12	9,68	11,52	11,83	9,87	8,95	8,04
Kota Banjar	7,84	8,05	9,60	9,51	7,77	7,32	7,11
Kab. Bandung Barat	7,84	8,05	9,60	9,51	7,77	7,32	7,11
Kab. Pangandaran	9,07	9,04	10,97	10,53	8,42	7,66	6,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2025, data diolah

Tabel 4.1 menunjukkan fluktuasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024. Secara umum, sebagian besar wilayah mengalami penurunan TPT dari tahun 2018 hingga 2024, meskipun terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Lonjakan ini berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, khususnya industri, perdagangan, dan jasa. Penurunan permintaan terhadap produk industri serta pembatasan mobilitas masyarakat memaksa banyak perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja, sehingga jumlah

pengangguran terbuka meningkat secara tajam pada tahun tersebut. Fenomena ini terlihat pada Kabupaten Bandung yang mencatat TPT 14,29 persen pada 2020, meningkat dari 9,83 persen pada 2018, serta Kota Depok yang meningkat dari 8,55 persen pada 2018 menjadi 12,25 persen pada 2020.

Perbedaan karakteristik ekonomi antar wilayah turut memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Wilayah yang memiliki industrialisasi tinggi dan pertumbuhan urbanisasi cepat, seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung, mencatat TPT yang relatif tinggi pada awal periode. Tingginya jumlah angkatan kerja dari penduduk lokal maupun tenaga kerja dari luar daerah, dibandingkan dengan kapasitas penyerapan lapangan kerja di sektor formal, menjadi faktor utama tingginya TPT. Sektor industri yang padat modal membutuhkan keterampilan khusus dan cenderung menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas, sehingga pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di wilayah tersebut.

Wilayah dengan ekonomi yang didominasi sektor agraris dan perdagangan tradisional, seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Garut, menunjukkan TPT yang relatif lebih rendah sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2024, Kabupaten Pangandaran mencatat TPT terendah sebesar 1,58 persen, diikuti Kabupaten Ciamis sebesar 3,37 persen dan Kabupaten Majalengka sebesar 4,01 persen. Rendahnya tingkat pengangguran di wilayah ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, perdagangan tradisional, dan sektor informal tetap menjadi penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat. Struktur ekonomi yang memungkinkan tenaga kerja tetap terserap, meskipun produktivitas relatif rendah, menjadikan TPT di daerah pedesaan lebih stabil dan cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan yang bergantung pada sektor formal. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai distribusi pengangguran terbuka di Jawa Barat serta faktor ekonomi yang memengaruhi penyerapannya di masing-masing wilayah.

4.1.2 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, adalah rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan penduduk untuk membeli barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu, biasanya sebulan atau setahun, yang kemudian dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena peningkatan pengeluaran per kapita menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan non-dasar. Pengeluaran per kapita mencakup hal-hal selain makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

**Tabel 4.2 Pengeluaran per Kapita di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2024 (Persen)**

Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Bandung	10.203	10.502	10.201	10.307	10.588	11.018	11.392
Kab. Bekasi	11.155	11.610	11.241	11.341	11.757	12.123	12.500
Kab. Bogor	10.323	10.683	10.317	10.410	10.860	11.153	11.563
Kab. Ciamis	9.190	9.557	9.288	9.259	9.428	9.750	10.085
Kab. Cianjur	7.874	8.290	7.980	8.052	8.244	8.626	9.026
Kab. Cirebon	10.212	10.670	10.342	10.368	10.791	11.128	11.529
Kab. Garut	7.597	8.099	7.876	7.961	8.227	8.685	9.168
Kab. Indramayu	9.633	10.090	9.859	9.810	10.166	10.580	11.010
Kab. Karawang	11.277	11.856	11.315	11.522	11.927	12.392	12.942
Kab. Kuningan	9.297	9.673	9.459	9.409	9.620	10.011	10.418
Kab. Majalengka	9.416	9.822	9.521	9.591	9.950	10.340	10.842
Kab. Purwakarta	11.372	11.819	11.614	11.669	12.193	12.619	13.099
Kab. Subang	10.715	11.012	10.790	10.854	11.294	11.537	11.894
Kab. Sukabumi	8.618	8.973	8.823	8.850	9.210	9.482	9.815
Kab. Sumedang	10.153	10.406	10.217	10.262	10.776	11.136	11.589
Kab. Tasikmalaya	7.761	8.092	7.852	7.829	8.177	8.562	8.965
Kota Bandung	16.630	17.254	16.887	16.996	17.639	18.236	18.795
Kota Bekasi	15.755	16.157	15.776	15.903	16.239	16.479	16.775
Kota Bogor	11.348	11.825	11.564	11.716	12.058	12.656	13.154
Kota Cirebon	11.397	11.930	11.800	11.810	12.087	12.506	12.869
Kota Depok	15.262	15.696	15.281	15.420	15.926	16.279	16.640
Kota Sukabumi	10.609	11.204	10.999	10.942	10.942	11.799	12.252
Kota Tasikmalaya	9.855	10.414	10.263	10.213	10.578	11.063	11.431
Kota Cimahi	11.921	12.448	12.025	12.019	12.500	12.883	13.278
Kota Banjar	10.329	10.705	10.535	10.476	10.967	11.356	11.811
Kab. Bandung Barat	8.329	8.684	8.455	8.546	9.044	9.392	9.583
Kab. Pangandaran	8.968	9.423	9.084	9.065	9.389	9.406	9.654

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2025, data diolah

Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan pengeluaran per kapita di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024. Secara umum, pengeluaran per kapita mengalami tren peningkatan di hampir seluruh wilayah, meskipun terdapat variasi tingkat pertumbuhan antar kabupaten/kota. Lonjakan pengeluaran per kapita ini mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal, yang dipengaruhi oleh faktor inflasi, pendapatan rumah tangga, dan aktivitas ekonomi di sektor formal maupun informal. Misalnya, Kota Bandung mengalami peningkatan pengeluaran per kapita dari Rp16.630 ribu pada 2018 menjadi Rp18.795 ribu pada 2024, sementara Kabupaten Bekasi meningkat dari Rp11.155 ribu menjadi Rp12.500 ribu pada periode yang sama.

Perbedaan pengeluaran per kapita antar wilayah mencerminkan karakteristik ekonomi lokal. Wilayah perkotaan dengan tingkat industrialisasi tinggi, seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok, menunjukkan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang ekonominya lebih banyak didominasi sektor agraris, seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga dan akses terhadap barang dan jasa di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi, sehingga mendorong pengeluaran per kapita yang lebih besar. Selain itu, kabupaten/kota yang menjadi pusat perdagangan dan jasa juga menunjukkan peningkatan pengeluaran per kapita yang lebih stabil sepanjang periode pengamatan.

Wilayah dengan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan tradisional, seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Bandung Barat, mencatat pengeluaran per kapita yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan, meskipun tetap menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Misalnya, Kabupaten Pangandaran meningkat dari Rp8.968 ribu pada 2018 menjadi Rp9.654 ribu pada 2024, dan Kabupaten Ciamis dari Rp9.190 ribu menjadi Rp10.085 ribu. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di daerah pedesaan, meskipun nilai pengeluarannya masih lebih rendah dibanding wilayah perkotaan.

4.1.3 Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin diukur berdasarkan kemampuan ekonomi seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, yang dinilai dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan tahunan yang ditetapkan. Jumlah penduduk miskin menunjukkan betapa pentingnya memenuhi kebutuhan dasar.

**Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2024 (Persen)**

Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Bandung	246,13	223,21	263,60	269,18	258,61	245,49	239,87
Kab. Bekasi	157,21	149,43	186,30	202,73	201,14	204,09	204,54
Kab. Bogor	415,02	395,03	465,67	491,24	474,74	453,76	446,79
Kab. Ciamis	85,72	79,41	91,39	96,60	93,96	90,84	90,79
Kab. Cianjur	221,58	207,07	234,47	260,02	246,81	240,06	239,30
Kab. Cirebon	232,37	217,64	247,94	271,02	266,10	249,18	245,92
Kab. Garut	241,31	235,19	262,78	281,36	276,67	260,48	259,32
Kab. Indramayu	204,18	191,86	220,31	228,59	225,04	214,74	212,14
Kab. Karawang	187,96	173,66	195,41	210,78	199,91	187,23	187,77
Kab. Kuningan	131,16	123,16	139,20	143,35	140,25	133,88	131,83
Kab. Majalengka	129,29	121,06	138,21	151,14	147,12	138,74	134,58
Kab. Purwakarta	75,94	71,86	80,17	84,27	83,44	81,54	81,44
Kab. Subang	136,61	129,18	149,81	158,97	155,34	152,33	152,56
Kab. Sukabumi	166,33	153,30	175,10	194,35	186,28	178,71	175,93
Kab. Sumedang	112,14	104,18	118,38	126,28	120,12	111,39	108,89
Kab. Tasikmalaya	84,22	76,98	86,13	89,46	87,13	79,37	76,71
Kota Bandung	89,38	84,67	100,02	112,50	109,82	102,80	101,10
Kota Bekasi	119,82	113,65	134,01	144,12	137,39	129,40	128,84
Kota Bogor	64,85	63,97	75,04	80,09	79,15	74,95	73,93
Kota Cirebon	28,03	26,80	30,61	31,98	31,47	29,49	29,17
Kota Depok	49,39	49,35	60,43	63,86	64,36	61,95	62,60
Kota Sukabumi	23,20	21,87	25,42	27,19	26,59	24,96	24,10
Kota Tasikmalaya	84,22	76,98	86,13	89,46	87,13	79,37	76,71
Kota Cimahi	29,94	26,91	31,64	32,48	31,16	28,56	27,00
Kota Banjar	10,41	10,07	11,16	13,37	12,73	11,66	11,16
Kab. Bandung Barat	169,00	159,03	179,46	190,77	183,67	179,43	179,70
Kab. Pangandaran	32,19	30,73	36,05	39,07	37,91	36,70	35,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2025, data diolah

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah penduduk miskin di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024. Secara umum, sebagian besar wilayah mencatat fluktuasi jumlah penduduk miskin, dengan kecenderungan

meningkat pada tahun 2020 hingga 2021. Lonjakan ini berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19, yang menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat aktivitas ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Contohnya, Kabupaten Bandung meningkat dari 246,13 ribu jiwa pada 2018 menjadi 269,18 ribu jiwa pada 2021, sedangkan Kota Bandung meningkat dari 89,38 ribu jiwa menjadi 112,50 ribu jiwa pada periode yang sama. Fenomena ini mencerminkan ketidakmampuan sebagian rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar akibat perlambatan ekonomi.

Perbedaan jumlah penduduk miskin antar wilayah dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi lokal dan kapasitas pendapatan masyarakat. Wilayah perkotaan dengan industrialisasi tinggi, seperti Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung, mencatat jumlah penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan beberapa kota kecil namun tetap lebih rendah dibanding kabupaten dengan ekonomi dominan agraris. Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cianjur menunjukkan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi karena tingginya populasi dan terbatasnya kapasitas sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi dan peluang kerja formal menjadi faktor penting dalam menentukan jumlah penduduk miskin di setiap wilayah.

Wilayah dengan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan tradisional, seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran, mencatat jumlah penduduk miskin yang relatif lebih rendah dibanding kabupaten berpenduduk padat lainnya, meskipun tetap mengalami peningkatan pada tahun-tahun tertentu. Misalnya, Kabupaten Pangandaran meningkat dari 32,19 ribu jiwa pada 2018 menjadi 39,07 ribu jiwa pada 2021, kemudian menurun menjadi 35,95 ribu jiwa pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perdagangan tradisional tetap menjadi penopang utama kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan, memungkinkan sebagian rumah tangga tetap memenuhi kebutuhan dasar meskipun produktivitas relatif rendah. Data ini memberikan gambaran distribusi kemiskinan di Jawa Barat dan faktor ekonomi yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota.

4.1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah persentase perubahan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu yang biasanya dihitung setiap tahun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2025). Indikator ini menunjukkan dinamika demografis sebuah wilayah yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang cepat, yang dapat menimbulkan tekanan terhadap penyediaan lapangan kerja, layanan publik, dan sumber daya ekonomi.

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2024 (Persen)

Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Bandung	1,85	1,84	1,28	1,56	1,49	0,97	0,94
Kab. Bekasi	3,90	3,95	1,64	1,93	1,86	1,44	1,35
Kab. Bogor	2,42	2,41	1,25	1,54	1,46	1,32	1,23
Kab. Ciamis	0,57	0,57	0,66	0,94	0,87	0,66	0,65
Kab. Cianjur	0,42	0,38	1,29	1,57	1,50	1,17	1,14
Kab. Cirebon	0,78	0,78	0,91	1,20	1,12	1,42	1,35
Kab. Garut	0,92	0,89	0,71	0,99	0,92	1,36	1,33
Kab. Indramayu	0,55	0,55	0,95	1,23	1,16	1,18	1,14
Kab. Karawang	1,07	1,04	1,33	1,62	1,54	1,28	1,24
Kab. Kuningan	0,60	0,60	1,17	1,45	1,38	1,05	1,04
Kab. Majalengka	0,49	0,49	1,10	1,38	1,31	0,97	0,97
Kab. Purwakarta	1,30	1,27	1,54	1,82	1,75	1,41	1,38
Kab. Subang	1,07	1,08	0,83	1,11	1,04	1,23	1,12
Kab. Sukabumi	0,53	0,50	1,48	1,77	1,69	1,02	0,99
Kab. Sumedang	0,54	0,50	0,51	0,79	0,72	0,81	0,79
Kab. Tasikmalaya	0,44	0,40	1,16	1,45	1,37	1,29	1,27
Kota Bandung	0,47	0,43	0,20	0,48	0,41	0,92	0,91
Kota Bekasi	2,73	2,74	0,83	1,12	1,04	1,18	1,04
Kota Bogor	1,69	1,67	0,91	1,19	1,12	0,96	0,89
Kota Cirebon	0,95	0,95	1,14	1,43	1,35	0,94	0,91
Kota Depok	3,54	3,57	1,64	1,92	1,85	1,55	1,37
Kota Sukabumi	1,01	0,98	1,44	1,73	1,65	1,48	1,46
Kota Tasikmalaya	0,44	0,40	1,16	1,45	1,37	1,29	1,27
Kota Cimahi	1,35	1,33	0,48	0,76	0,69	1,41	1,39
Kota Banjar	1,26	1,24	1,65	1,93	1,86	1,43	1,40
Kab. Bandung Barat	1,26	1,24	1,65	1,93	1,86	1,43	1,40
Kab. Pangandaran	0,57	0,57	0,96	1,24	1,17	0,67	0,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2025, data diolah

Tabel 4.4 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan penduduk di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024. Secara umum, laju

pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada akhir periode pengamatan. Pada tahun 2018–2019, beberapa wilayah mencatat laju pertumbuhan yang relatif tinggi, terutama Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi yang berada di atas 3 persen. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk di hampir seluruh wilayah, yang berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19, seperti meningkatnya angka kematian, menurunnya mobilitas penduduk, serta perlambatan aktivitas migrasi masuk ke wilayah Jawa Barat.

Perbedaan laju pertumbuhan penduduk antar wilayah dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, migrasi, dan karakteristik ekonomi lokal. Wilayah perkotaan dan kawasan industri seperti Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah agraris. Tingginya pertumbuhan penduduk di wilayah ini berkaitan dengan masuknya penduduk usia produktif dari daerah lain untuk mencari pekerjaan di sektor industri dan jasa. Sementara itu, kabupaten dengan karakter pedesaan seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang lebih rendah, mencerminkan rendahnya arus migrasi masuk dan dominasi pertumbuhan alami penduduk.

Pada periode 2022–2024, laju pertumbuhan penduduk di sebagian besar wilayah cenderung stabil pada kisaran 0,9 hingga 1,5 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan penduduk di Jawa Barat mulai kembali normal setelah pandemi, meskipun belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk yang stabil ini memiliki implikasi penting terhadap penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan pelayanan publik, karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kapasitas ekonomi dapat memengaruhi tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, data pada Tabel 4.4 memberikan gambaran penting

mengenai tekanan demografis yang dihadapi kabupaten/kota di Jawa Barat selama periode penelitian.

4.1.5 Rata-rata Lama Sekolah

Badan Pusat Statistik (2025) mendefinisikan rata-rata lama sekolah sebagai ukuran jumlah tahun yang dihabiskan oleh individu berusia 15 tahun ke atas untuk mengikuti pendidikan formal. RLS menunjukkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Semakin tinggi angka RLS, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut, karena penduduk menempuh pendidikan lebih lama, yang menghasilkan keterampilan yang lebih baik dan daya saing yang lebih baik di pasar kerja.

**Tabel 4.5 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2024 (Persen)**

Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Bandung	8,58	8,79	8,96	9,07	9,08	9,10	9,15
Kab. Bekasi	8,84	8,84	9,12	9,30	9,53	9,57	9,76
Kab. Bogor	7,88	8,29	8,30	8,31	8,34	8,37	8,39
Kab. Ciamis	7,60	7,69	7,70	7,90	8,00	8,09	8,10
Kab. Cianjur	6,93	6,97	7,18	7,19	7,20	7,22	7,33
Kab. Cirebon	6,62	6,71	6,92	7,10	7,40	7,64	7,65
Kab. Garut	7,50	7,51	7,52	7,53	7,83	7,84	7,85
Kab. Indramayu	5,98	5,99	6,30	6,52	6,83	6,94	6,95
Kab. Karawang	7,35	7,65	7,77	7,78	7,96	8,04	8,05
Kab. Kuningan	7,36	7,38	7,57	7,80	7,88	7,89	7,90
Kab. Majalengka	6,91	7,09	7,27	7,31	7,49	7,52	7,53
Kab. Purwakarta	7,75	7,92	8,09	8,10	8,11	8,13	8,14
Kab. Subang	6,84	6,85	7,10	7,11	7,20	7,45	7,46
Kab. Sukabumi	6,80	7,02	7,07	7,10	7,11	7,33	7,34
Kab. Sumedang	8,17	8,27	8,51	8,52	8,72	8,73	8,74
Kab. Tasikmalaya	9,04	9,13	9,33	9,52	9,53	9,54	9,63
Kota Bandung	10,63	10,74	10,75	10,99	11,00	11,06	11,07
Kota Bekasi	11,09	11,10	11,16	11,31	11,44	11,66	11,79
Kota Bogor	10,30	10,32	10,33	10,53	10,63	10,64	10,71
Kota Cirebon	9,89	9,90	9,91	10,12	10,33	10,37	10,53
Kota Depok	10,85	11,00	11,28	11,46	11,47	11,58	11,59
Kota Sukabumi	9,53	9,58	9,59	9,81	10,14	10,37	10,38
Kota Tasikmalaya	9,04	9,13	9,33	9,52	9,53	9,54	9,63
Kota Cimahi	10,94	10,95	10,96	11,08	11,21	11,39	11,52
Kota Banjar	7,97	8,18	8,19	8,20	8,22	8,23	8,24
Kab. Bandung Barat	7,97	8,18	8,19	8,20	8,22	8,23	8,24
Kab. Pangandaran	7,58	7,67	7,74	7,85	8,03	8,04	8,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2025, data diolah

Tabel 4.5 menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2024. Secara keseluruhan, rata-rata lama sekolah cenderung meningkat di hampir semua wilayah, menunjukkan adanya perbaikan kualitas pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah masyarakat. Kenaikan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun kabupaten, meskipun tingkat pertumbuhannya berbeda-beda. Misalnya, Kota Bandung meningkat dari 10,63 tahun pada 2018 menjadi 11,07 tahun pada 2024, sedangkan Kabupaten Indramayu meningkat dari 5,98 tahun menjadi 6,95 tahun pada periode yang sama, menunjukkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan kabupaten yang lebih rural.

Perbedaan rata-rata lama sekolah antar wilayah berkaitan dengan akses pendidikan dan kualitas fasilitas pendidikan. Wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi mencatat rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibanding kabupaten dengan karakter ekonomi agraris atau pedesaan, seperti Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Garut. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan formal, ketersediaan tenaga pengajar, serta sarana dan prasarana sekolah lebih baik di wilayah perkotaan, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang lebih rendah tetap menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode pengamatan, meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibanding wilayah perkotaan. Misalnya, Kabupaten Pangandaran meningkat dari 7,58 tahun pada 2018 menjadi 8,10 tahun pada 2024, sedangkan Kabupaten Cianjur meningkat dari 6,93 tahun menjadi 7,33 tahun. Tren ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, sekaligus menurunkan angka putus sekolah di wilayah pedesaan. Data ini memberikan gambaran mengenai distribusi pendidikan di Jawa Barat dan perbedaan capaian pendidikan antar kabupaten/kota.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Pengujian Model Regresi Data Panel

Analisis data panel menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Tiga model efek utama *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)* dapat digunakan. Uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier (LM) adalah beberapa contoh uji yang digunakan untuk menentukan model penelitian kuantitatif yang paling cocok.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model* lebih tepat dalam estimasi. Nilai probabilitas F (Prob. F) adalah dasar pengambilan keputusan. Jika nilai probabilitas F lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05), maka model yang dipilih adalah model efek umum, tetapi jika nilai probabilitas F lebih rendah dari 0,05, maka *Fixed Effect Model* dipilih. Hipotesis yang digunakan adalah:

- H_0 : Prob. Cross Section $F > 0,05$ model yang sesuai adalah *Common Effect Model*.
- H_1 : Prob. Cross Section $F < 0,05$ model yang sesuai adalah *Fixed Effect Model*.

Adapun hasil Uji Chow diperoleh melalui *redundant fixed effects likelihood ratio*:

Tabel 4. 6
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	27,696262	(26,158)	0,0000
Cross-section Chi-square	324,166873	26	0,0000

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 3

Berdasarkan pada tabel 4.1 hasil Uji Chow, diperoleh nilai *probabilitas cross-section F* sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Artinya, model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.

2. Uji Hausman

Random Effect Model (REM) atau *Fixed Effect Model (FEM)* dapat digunakan dengan menggunakan uji Hausman. Nilai probabilitas (p) pada *cross-section random* digunakan untuk membuat keputusan. Salah satu hipotesis yang digunakan adalah:

- H_0 : Probabilitas $> 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model*.
 - H_1 : Probabilitas $< 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*.
- Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan metode *correlated random effects Hausman test*.

Tabel 4. 7
Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-sq. d.f.	Prob
Cross-section random	69,268605	4	0,0000

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 4

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak karena diperoleh nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Jadi, *fixed effect model* adalah yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini.

4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Menurut hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model regresi data panel yang paling cocok untuk penelitian ini adalah *fixed effect model*. Hasil estimasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Regresi Fixed Effects Model (FEM)

Dependen Variabel	Y				
	Variabel	Koefisien	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C		25,32364	2,885461	8,776289	0,0000
X1		-0,001646	0,000257	-6,398334	0,0000
X2		0,000341	8,04E-05	4,241633	0,0000
X3		0,230094	0,183651	1,252887	0,2121
X4		-0,475745	0,567702	-0,838019	0,4033

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.3 maka bentuk umum persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 25,32364 - 0,001646X_1 + 0,000341X_2 + 0,230094X_3 - 0,475745X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots(4.1)$$

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 25,32364 menunjukkan bahwa apabila variabel Pengeluaran per Kapita (X_1), Jumlah Penduduk Miskin (X_2), Laju Pertumbuhan Penduduk (X_3), dan Rata-rata Lama Sekolah (X_4) dianggap tidak ada atau bernilai nol maka Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) diperkirakan rata-rata sebesar 25,32364 persen.
2. Nilai koefisien pengeluaran per kapita (X_1) pada estimasi regresi sebesar - 0,001646. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel lain dianggap konstan setiap kenaikan pengeluaran per kapita sebesar 1 ribu akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (Y) sebesar 0,001646 persen.
3. Nilai koefisien jumlah penduduk miskin (X_2) pada estimasi regresi sebesar 0,000341. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel lain dianggap konstan setiap kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 1 jiwa akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka (Y) sebesar 0,000341 persen.
4. Nilai koefisien laju pertumbuhan penduduk (X_3) sebesar 0,230094. Hal ini berarti dengan asumsi variabel lain konstan, setiap kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka (Y) sebesar 0,230094 persen.
5. Nilai koefisien rata-rata lama sekolah (X_4) sebesar - 0,475745. Hal ini berarti dengan asumsi variabel lain konstan, setiap kenaikan rata-rata lama sekolah sebesar 1 tahun justru menurunkan tingkat pengangguran terbuka (Y) sebesar - 0,475745 persen.

Tabel 4. 9
Koefisien Dummy tiap Kabupaten dan Kota

Kabupaten dan Kota	Koefisien	Koefisien C	Intersep
Kota Bandung	25,32364	12,98546	12,33818
Kab. Bandung	25,32364	-2,175216	10,810244
Kab. Bekasi	25,32364	0,349592	12,635868
Kab. Bogor	25,32364	-12,615940	25,6014
Kab. Ciamis	25,32364	-1,441331	14,426791
Kab. Cianjur	25,32364	-11,075360	24,06082
Kab. Cirebon	25,32364	-8,507241	21,492701
Kab. Garut	25,32364	-7,402395	20,387855
Kab. Indramayu	25,32364	-3,676862	16,662322
Kab. Karawang	25,32364	-4,141245	17,126705
Kab. Kuningan	25,32364	-0,958895	13,944355
Kab. Majalengka	25,32364	-0,752936	12,232524
Kab. Purwakarta	25,32364	4,560106	8,425354
Kab. Subang	25,32364	-0,468240	13,4537
Kab. Sukabumi	25,32364	-2,283921	15,269381
Kab. Sumedang	25,32364	-0,935409	13,920869
Kab. Tasikmalaya	25,32364	-8,626559	4,358901
Kota Bekasi	25,32364	9,799046	22,784506
Kota Bogor	25,32364	5,053752	18,039212
Kota Cirebon	25,32364	6,857531	19,842991
Kota Depok	25,32364	12,028650	25,01411
Kota Sukabumi	25,32364	-1,274548	14,260008
Kota Tasikmalaya	25,32364	2,991073	9,994387
Kota Cimahi	25,32364	7,648693	5,336767
Kota Banjar	25,32364	3,156681	9,828779
Kab. Bandung Barat	25,32364	-5,084717	18,070177
Kab. Pangandaran	25,32364	0,800720	12,18474

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 2

Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, dapat diketahui nilai intersep setiap kabupaten/kota yang dapat dilihat pada tabel 4.4. Diketahui yang memiliki nilai tertinggi yaitu Kota Depok sebesar 25,01411 dan nilai intersep terendah terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya sebesar 5,336767. Artinya, pengangguran tertinggi terdapat pada Kota Depok dan pengangguran terendah terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data model memiliki pola sebaran yang mengikuti distribusi normal. Uji ini penting karena salah satu asumsi dasar regresi yang baik adalah terpenuhinya distribusi normal. Akibatnya, uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik untuk membandingkan nilai probabilitas Jarque–Bera dan nilai kritisnya.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Jarque–Bera

Probability	0,911696
-------------	----------

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 5

Berdasarkan tampilan tabel 4.5 hasil uji Normalitas bahwa nilai prob. JB = 0,911696 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa nilai residual berdistribusi secara normal atau dengan kata lain asumsi Normalitas terpenuhi.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas menguji data untuk mengetahui apakah variabel independen penelitian terhubung atau tidak. Ini dilakukan dengan asumsi bahwa nilai tolerabilitas tidak melebihi nilai standar yaitu 0,8, maka ada hubungan antara variabel independen penelitian.

Tabel 4. 11
Uji Multikolinearitas

Variabel	X1	X2	X3	X4
X1	1,000000	-0,302721	0,171391	0,778273
X2	-0,302721	1,000000	-0,111666	-0,452818
X3	0,171391	-0,111666	1,000000	0,209860
X4	0,778273	-0,452818	0,209860	1,000000

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 6

Hasil uji Multikolinearitas, yang disajikan pada tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini masih berada di bawah ambang batas 0,80, yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mereka.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam varian residual antara pengamatan dalam model regresi. Adanya kondisi homoskedastisitas varian residual yang konstan merupakan syarat untuk penelitian yang efektif. Oleh karena itu, pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai probabilitas. Dalam hal nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, maka Heteroskedastisitas tidak terjadi ($\alpha = 0,05$).

Tabel 4. 12
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas
X1	0,0176
X2	0,4361
X3	0,2017
X4	0,3065

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 7

Hasil uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk semua variabel independen berada di atas 5% ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa tidak ada indikasi Heteroskedastisitas dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varian residual mungkin homoskedastis atau bahwa nilai *residual absolut* tidak mempengaruhinya secara signifikan.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah pengujian yang digunakan pada data runtut waktu (*time series*) untuk melihat apakah terdapat hubungan atau pola tertentu antara nilai suatu variabel pada periode sekarang dengan periode sebelumnya. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa residual pada model regresi tidak saling berhubungan, sehingga model layak digunakan. Berikut hasil uji autokorelasi pada model *Fixed Effect Model (FEM)*:

Tabel 4. 13
Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	2,118717
--------------------	----------

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 2

Berdasarkan tabel distribusi Durbin Watson, dengan $(K';N)=(4;189)$ didapatkan nilai $dL = 1,7189$ dan $dU = 1,8053$ sedangkan nilai Durbin Watson (d) model regresi sebesar $2,118717$. Berdasarkan hasil olah data didapatkan nilai $d_U < d < 4 - d_L$ ($1.8053 < 2.118717 < 2.2811$) maka tidak terjadi autokorelasi.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan untuk melihat pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5%. Pengujian ini menggunakan uji t dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan (α) sebesar 5%, serta derajat kebebasan (*degree of freedom*) dihitung dengan rumus $df = (n - k)$, di mana n merupakan jumlah data atau observasi dan k adalah jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil perhitungan, $df = (n-k)$, $df=(189-5)=184$ dengan $\alpha=5\%$ didapatkan nilai t-tabel sebesar 1,973. Hasil perhitungan t-tabel tersebut kemudian dibandingkan dengan t-statistik.

Tabel 4. 14
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	25,32364	2,885461	8,776289	0,0000
X1	-0,001646	0,000257	-6,398334	0,0000
X2	0,000341	8,04E-05	4,241633	0,0000
X3	0,230094	0,183651	1,252887	0,2121
X4	-0,475745	0,567702	-0,838019	0,4033

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui:

1. Uji Hipotesis Pengeluaran per Kapita (X_1) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_0 : Pengeluaran per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

H_1 : Pengeluaran per kapita berpengaruh negatif terhadap

tingkat pengangguran terbuka.

Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran per kapita menunjukkan angka negatif sebesar $-0,001646$, menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan tabel 4.9 nilai probabilitas variabel pengeluaran per kapita adalah $0,0000$ lebih kecil dari tingkat signifikansi $0,05$ sehingga variabel ini dinyatakan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Nilai t-statistic sebesar $-6,398334 < t\text{-tabel} (-1,973)$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan menolak H_0 dan menerima H_1 yang berarti secara statistik pengeluaran per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2. Uji Hipotesis Jumlah Penduduk Miskin (X_2) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_0 : Jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

H_1 : Jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari variabel jumlah penduduk miskin adalah sebesar $0,000341$ yang berarti jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas variabel jumlah penduduk miskin adalah $0,0000$ lebih kecil dari tingkat signifikansi $0,05$. Diketahui nilai t-statistic sebesar $4,241633$ sehingga t-statistic ($4,241633$) $> t\text{-tabel} (1,973)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara statistik jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

3. Uji Hipotesis Laju Pertumbuhan Penduduk (X_3) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_0 : Laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

H_1 : Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Diketahui bahwa nilai koefisien regresi laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 0,230094 yang berarti variabel ini memiliki arah pengaruh positif. Namun, berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas variabel laju pertumbuhan penduduk adalah 0,2121 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai t-statistic sebesar 1,252887 sehingga $|1,252887| < t\text{-tabel}(1,973)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya secara statistik laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

4. Uji Hipotesis Rata-rata Lama Sekolah (X_4) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_0 : Rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

H_1 : Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Diketahui bahwa koefisien regresi variabel rata-rata lama sekolah adalah sebesar $-0,475745$, yang berarti variabel ini memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa nilai probabilitas variabel rata-rata lama sekolah adalah 0,4033 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Diketahui nilai t-statistic sebesar $-0,838019$ sehingga $|-0,838019| < t\text{-tabel}(1,973)$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya secara statistik rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

4.4.2 Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)

Pada taraf signifikansi 5%, uji F statistik digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas lebih besar dari α (0,05), maka variabel independen secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika nilai probabilitas lebih rendah dari α (0,05), maka variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan mempertimbangkan derajat kebebasan, pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95 persen dan tingkat kesalahan 5 persen.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	25,48124
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 2

Nilai F hitung sebesar 25,48124 lebih besar dari F tabel, yaitu 2,420745715, dan nilai probabilitas F sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap satu dari lima variabel independen rata-rata lama sekolah, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, dan pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat pengangguran terbuka.

4.4.3 Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, atau sejauh mana varians atau penyebaran variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa hasil analisis yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi *Adjusted R-squared* adalah tepat.

Tabel 4. 6
Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0,828715
Adjusted R-squared	0,796192

Sumber: Analisis Data 2025, Lampiran 2

Nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,796192, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.11. Naik turunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,796192 dapat dijelaskan secara bersamaan atau secara bersamaan oleh variasi naik turunnya

pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, dan variabel lain di luar model penelitian yang digunakan. Selain itu, hasil estimasi dari *fixed effect model* (FEM) menunjukkan bahwa nilai konstanta berbeda untuk setiap kabupaten atau kota. Ini menunjukkan bahwa ada efek tetap yang mencerminkan ciri-ciri unik setiap daerah, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan potensi lokal. Efek-efek ini memengaruhi tingkat pengangguran terbuka meskipun variabel independen yang digunakan sama.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pengeluaran per Kapita terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di semua Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dipengaruhi negatif oleh pengeluaran per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di suatu wilayah berkorelasi positif dengan tingkat pengeluaran masyarakat. Pengeluaran per kapita adalah ukuran penting yang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan daya beli sebuah masyarakat. Ketika daya beli meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat, yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Perluasan aktivitas ekonomi ini dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan pengangguran. Pengeluaran per kapita yang meningkat menunjukkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang mendukung kualitas sumber daya manusia. Akses tersebut juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan peluang kerja di sektor formal, dan mengurangi risiko pengangguran jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Konsumsi Keynes (*Absolute Income Hypothesis*) yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, sehingga memperkuat permintaan agregat dalam perekonomian. Meningkatnya permintaan agregat akan mendorong produsen untuk meningkatkan output dan memperluas aktivitas produksi, yang

pada akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian, pengeluaran per kapita tidak hanya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai mekanisme transmisi antara peningkatan konsumsi, pertumbuhan aktivitas ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kuncoro (2018) yang menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat mampu mendorong penurunan pengangguran, terutama di wilayah dengan dominasi sektor industri dan jasa.

4.5.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat

Pengangguran Terbuka

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi secara positif oleh jumlah penduduk miskin. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko pengangguran lebih tinggi di daerah dengan lebih banyak penduduk miskin. Kondisi ini terjadi karena kelompok masyarakat miskin biasanya menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi mereka untuk masuk ke pasar kerja. Teori kemiskinan struktural menjelaskan temuan ini dengan mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah rendahnya pendapatan; kemiskinan juga mencakup kurangnya akses ke pendidikan, keterampilan, modal, dan kesempatan kerja (Todaro & Smith, 2020). Karena keterbatasan ini, orang-orang di daerah miskin tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Kualitas sumber daya manusia penduduk miskin lebih rendah, yang membuat mereka sulit bersaing di pasar kerja formal. Hal ini meningkatkan kemungkinan pengangguran bagi orang miskin, terutama di daerah di mana sistem ekonomi kontemporer membutuhkan keterampilan khusus (Sen, 1999). Karena kemampuan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang stabil dan menguntungkan. Selain itu, hubungan antara kemiskinan dan pengangguran saling menguntungkan: pengangguran meningkatkan kemungkinan jatuh ke kemiskinan, sementara kemiskinan membatasi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Selain itu, temuan penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya. Suryahadi et al. (2020) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin menyebabkan peningkatan pengangguran terbuka sebagai akibat dari kurangnya akses ke lapangan kerja produktif. Pratama (2021) menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, terutama di daerah perkotaan yang memiliki banyak kompetisi kerja. Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah komponen utama dalam mengurangi pengangguran terbuka di tingkat provinsi.

4.5.3 Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil pengujian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak secara otomatis meningkatkan pengangguran. Dalam penelitian ini, pertumbuhan penduduk belum memberikan tekanan langsung terhadap pasar kerja, sehingga perubahan jumlah penduduk tidak tercermin secara signifikan pada tingkat pengangguran terbuka. Salah satu penjelasan yang relevan adalah adanya *time lag effect*, yaitu jeda waktu antara pertumbuhan jumlah penduduk dan masuknya penduduk tersebut ke dalam kelompok usia kerja yang produktif (Bongaarts, 2017). Dengan kata lain, sebagian pertumbuhan penduduk selama periode penelitian belum sepenuhnya memasuki angkatan kerja, sehingga dampaknya terhadap pengangguran belum terlihat secara langsung.

Selain itu, kapasitas ekonomi Jawa Barat yang relatif kuat khususnya pada sektor industri, perdagangan, dan jasa memungkinkan perekonomian daerah menyerap tambahan tenaga kerja secara lebih baik. Struktur ekonomi yang dinamis tersebut membantu menyeimbangkan laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan pandangan Bloom & Freeman (1986) yang menekankan bahwa pengaruh faktor demografi terhadap

pengangguran sangat bergantung pada kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, faktor demografis bukan merupakan determinan utama tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Sebaliknya, kualitas sumber daya manusia, kemampuan sektor ekonomi dalam menciptakan pekerjaan, serta struktur ekonomi daerah memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat pengangguran.

4.5.4 Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, meskipun arah hubungannya negatif. Secara teoritis, temuan ini selaras dengan Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang menekankan bahwa pendidikan seharusnya meningkatkan produktivitas individu dan memperluas peluang kerja (Becker, 1993). Namun, ketidaksignifikanan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pasar tenaga kerja di Jawa Barat. Salah satu penjelasan yang relevan adalah adanya fenomena *mismatch* dan *overeducation*, yaitu ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (McGuinness, 2006). Kondisi ini terjadi ketika jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi meningkat lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang berkualitas. Akibatnya, peningkatan pendidikan tidak secara otomatis menjamin penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga dampaknya terhadap pengangguran menjadi tidak signifikan.

Selain itu, dinamika pasar kerja pada periode penelitian turut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi pada sebagian besar sektor formal. Pembatasan aktivitas ekonomi dan penurunan kapasitas produksi membuat banyak perusahaan menunda atau mengurangi proses rekrutmen. Situasi ini melemahkan peran pendidikan formal dalam meningkatkan kesempatan kerja sebab lulusan berpendidikan tinggi pun menghadapi keterbatasan peluang kerja (ILO, 2021). Dengan demikian, pendidikan saja belum cukup untuk menurunkan

pengangguran tanpa adanya dukungan kebijakan yang memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa faktor kesejahteraan dan kemiskinan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap tingkat pengangguran dibandingkan faktor demografis maupun pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di Jawa Barat lebih bersifat struktural, bukan semata-mata akibat tingkat pendidikan yang belum optimal. Oleh karena itu, penanggulangan pengangguran perlu diarahkan pada peningkatan kualitas hidup Masyarakat, pengurangan kemiskinan struktural melalui akses pendidikan dan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang sesuai dengan struktur dan kebutuhan ekonomi daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal berikut:

1. Variabel pengeluaran per kapita berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat pada periode penelitian di mana kenaikan pengeluaran per kapita menyebabkan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.
2. Variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Tingkat pengangguran terbuka akan menurun jika jumlah penduduk miskin meningkat.
3. Variabel laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah negatif, pengaruh tersebut secara statistik tidak cukup kuat untuk menjelaskan perubahan tingkat pengangguran terbuka.
4. Variabel rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Walaupun koefisien regresi menunjukkan arah negatif, secara statistik variabel ini belum mampu menjelaskan variasi tingkat pengangguran terbuka secara signifikan.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini memungkinkan penulis membuat beberapa rekomendasi berikut:

1. Temuan ini menunjukkan implikasi berupa perlunya pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat program peningkatan keterampilan vokasional khususnya bagi angkatan kerja usia muda. Peningkatan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri diyakini dapat meningkatkan peluang kerja, menurunkan tingkat pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila program ini diimplementasikan secara terukur dan berbasis

kebutuhan pasar kerja maka dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.

2. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan pengendalian urbanisasi yang lebih efektif melalui pemerataan pembangunan antarwilayah. Urbanisasi yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di wilayah perkotaan karena keterbatasan lapangan kerja. Implementasi kebijakan pengendalian urbanisasi, seperti pengembangan pusat pertumbuhan baru di kabupaten/kota lain diperkirakan dapat menurunkan tekanan penduduk di kota besar serta mendorong pemerataan ekonomi.
3. Pengembangan industri padat karya perlu diprioritaskan, terutama pada wilayah dengan tingkat pengangguran relatif tinggi. Industri padat karya memiliki kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah. Jika pemerintah memperluas insentif investasi dan penyediaan infrastruktur dasar bagi industri padat karya maka diproyeksikan dapat menciptakan lapangan kerja baru secara signifikan dan meminimalkan jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat.
4. Intervensi kemiskinan berbasis produktivitas perlu diperkuat, misalnya melalui bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha mikro dan kecil. Intervensi yang berfokus pada peningkatan produktivitas terbukti lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan dibandingkan bantuan konsumtif. Jika intervensi berbasis produktivitas diterapkan secara konsisten maka akan muncul peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pengangguran dan memperbaiki kualitas hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M., Astuti, H., & Susilo, J. H. (2023). *Unemployment in Indonesia: An analysis of economic determinants from 2012–2021*. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 12(1), 69–82. <https://doi.org/10.15408/sjie.v12i1.29247>
- Al-Faridzi, S., Maidalena, & Yantri, N. (2023). Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, investasi asing, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8236–8250. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Baihawafi, M., & Sebayang, A. (2023). Pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terbuka. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 39–44. <https://doi.org/10.29313/jriieb.v3i1.1911>
- Berlianti, D. F., Abid, A. Al., & Ruby, A. C. (2024). Metode penelitian kuantitatif pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk menurut provinsi. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah. <https://www.bps.go.id/>
- Creswell, J. W. (2018). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-5). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dainty, G., Roring, J., Kumenaung, A. G., Lapian, A. L. C. P., & Ratulangi, U. S. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di empat kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(4), 70–87.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Introductory econometrics: A practical approach*. New York: McGraw-Hill.
- Johar, M. R. (2023). Hubungan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka: Mediasi laju pertumbuhan ekonomi. *Oikos: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 108–117. <https://doi.org/10.23969/oikos.v7i1.6035>
- Kalis, M. C. I., Hendri, M. I., & Haryadi, D. (2023). Urgensi perubahan pengenaan PPh final UMKM untuk masyarakat di wilayah perbatasan negara. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 82–90. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.570>

- Lestari, I. D., & Nilasari, A. (2025). Pengaruh laju pertumbuhan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2022. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(2), 483–493. <https://doi.org/10.36985/ywmawh84>
- Manihuruk, F. E., & Suharianto, J. (2024). Analisis pengaruh IPM, TPT, dan UMR terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan menggunakan regresi data panel. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 18(2), 246–258. <https://doi.org/10.19184/jpe.v18i2.47262>
- Pratiwi, A., & Wulansari, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145–158.
- Pratiwi, E. H., & Malik, N. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Bali tahun 2011–2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(1), 112–122. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i1.19670>
- Rafli, M. R., Nurhafiyansa, N., Syafa, M. K., & Aisyah, L. (2024). Okun's law: Analisis tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banjar ditinjau dari perspektif laju pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Ekonomi*, 5(1), 12–21. <https://doi.org/10.47747/jbme.v5i1.1595>
- Saputri, B., & Samsuddin, M. A. (2025). Pengaruh jumlah penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku tahun 2017–2023 (pendekatan data panel). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(3), 338–351.
- Soleha, A. R., & Faizin. (2023). Analisis pengaruh rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 75–90. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.1995>
- Sukirno, S. (2020). *Makroekonomi: Teori pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno, Y., & Arifin, Z. (2023). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 88–104.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Pembangunan ekonomi* (Edisi ke-12). Jakarta: Erlangga.
- Wicaksono, A., & Hidayat, R. (2021). Pengaruh pengeluaran per kapita terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(2), 145–158.
- Wulandari, F., Fadilla, N., & Wulandari, D. T. (2024). Analisis ketenagakerjaan dan kemiskinan. *Fathika*, 5(1), 128–139.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Kabupaten /Kota	Tahun	Pengeluaran per Kapita (Rp)	Jumlah Penduduk miskin (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kab. Bandung	2018	10203	246.13	1.85	8.58	9.83
Kab. Bandung	2019	10502	223.21	1.84	8.79	9.11
Kab. Bandung	2020	10201	263.60	1.28	8.96	14.29
Kab. Bandung	2021	10307	269.18	1.56	9.07	12.22
Kab. Bandung	2022	10588	258.61	1.49	9.08	10.64
Kab. Bandung	2023	11018	245.49	0.97	9.1	8.47
Kab. Bandung	2024	11392	239.87	0.94	9.15	7.34
Kab. Bekasi	2018	11155	157.21	3.90	8.84	10.23
Kab. Bekasi	2019	11610	149.43	3.95	8.84	9.81
Kab. Bekasi	2020	11241	186.30	1.64	9.12	11.05
Kab. Bekasi	2021	11341	202.73	1.93	9.3	9.32
Kab. Bekasi	2022	11757	201.14	1.86	9.53	8.41
Kab. Bekasi	2023	12123	204.09	1.44	9.57	7.71
Kab. Bekasi	2024	12500	204.54	1.35	9.76	5.99
Kab. Bogor	2018	10323	415.02	2.42	7.88	5.07
Kab. Bogor	2019	10683	395.03	2.41	8.29	5.51
Kab. Bogor	2020	10317	465.67	1.25	8.3	8.58
Kab. Bogor	2021	10410	491.24	1.54	8.31	8.32
Kab. Bogor	2022	10860	474.74	1.46	8.34	6.98
Kab. Bogor	2023	11153	453.76	1.32	8.37	6.52
Kab. Bogor	2024	11563	446.79	1.23	8.39	6.36
Kab. Ciamis	2018	9190	85.72	0.57	7.6	7.12
Kab. Ciamis	2019	9557	79.41	0.57	7.69	7.35
Kab. Ciamis	2020	9288	91.39	0.66	7.7	8.96
Kab. Ciamis	2021	9259	96.60	0.94	7.9	8.68
Kab. Ciamis	2022	9428	93.96	0.87	8	7.6
Kab. Ciamis	2023	9750	90.84	0.66	8.09	7.33
Kab. Ciamis	2024	10085	90.79	0.65	8.1	6.96
Kab. Cianjur	2018	7874	221.58	0.42	6.93	6.92
Kab. Cianjur	2019	8290	207.07	0.38	6.97	6.31
Kab. Cianjur	2020	7980	234.47	1.29	7.18	7.12
Kab. Cianjur	2021	8052	260.02	1.57	7.19	6.16
Kab. Cianjur	2022	8244	246.81	1.50	7.2	4.17
Kab. Cianjur	2023	8626	240.06	1.17	7.22	3.89
Kab. Cianjur	2024	9026	239.30	1.14	7.33	3.74
Kab. Cirebon	2018	10212	232.37	0.78	6.62	4.64
Kab. Cirebon	2019	10670	217.64	0.78	6.71	5.16
Kab. Cirebon	2020	10342	247.94	0.91	6.92	5.66

Lampiran 1. Lanjutan

Kabupaten /Kota	Tahun	Pengeluaran per Kapita (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kab. Cirebon	2021	10368	271.02	1.20	7.1	5.06
Kab. Cirebon	2022	10791	266.10	1.12	7.4	3.75
Kab. Cirebon	2023	11128	249.18	1.42	7.64	3.52
Kab. Cirebon	2024	11529	245.92	1.35	7.65	3.37
Kab. Garut	2018	7597	241.31	0.92	7.5	9.1
Kab. Garut	2019	8099	235.19	0.89	7.51	9.68
Kab. Garut	2020	7876	262.78	0.71	7.52	11.22
Kab. Garut	2021	7961	281.36	0.99	7.53	11.68
Kab. Garut	2022	8227	276.67	0.92	7.83	9.81
Kab. Garut	2023	8685	260.48	1.36	7.84	9.49
Kab. Garut	2024	9168	259.32	1.33	7.85	7.78
Kab. Indramayu	2018	9633	204.18	0.55	5.98	10.64
Kab. Indramayu	2019	10090	191.86	0.55	5.99	10.35
Kab. Indramayu	2020	9859	220.31	0.95	6.3	11.52
Kab. Indramayu	2021	9810	228.59	1.23	6.52	10.38
Kab. Indramayu	2022	10166	225.04	1.16	6.83	8.11
Kab. Indramayu	2023	10580	214.74	1.18	6.94	7.65
Kab. Indramayu	2024	11010	212.14	1.14	6.95	6.74
Kab. Karawang	2018	11277	187.96	1.07	7.35	5
Kab. Karawang	2019	11856	173.66	1.04	7.65	4.37
Kab. Karawang	2020	11315	195.41	1.33	7.77	5.84
Kab. Karawang	2021	11522	210.78	1.62	7.78	5.71
Kab. Karawang	2022	11927	199.91	1.54	7.96	4.16
Kab. Karawang	2023	12392	187.23	1.28	8.04	4.12
Kab. Karawang	2024	12942	187.77	1.24	8.05	4.01
Kab. Kuningan	2018	9297	131.16	0.60	7.36	8.57
Kab. Kuningan	2019	9673	123.16	0.60	7.38	8.49
Kab. Kuningan	2020	9459	139.20	1.17	7.57	12.17
Kab. Kuningan	2021	9409	143.35	1.45	7.8	10.78
Kab. Kuningan	2022	9620	140.25	1.38	7.88	8.83
Kab. Kuningan	2023	10011	133.88	1.05	7.89	8.53
Kab. Kuningan	2024	10418	131.83	1.04	7.9	8.34
Kab. Majalengka	2018	9416	129.29	0.49	6.91	8.05
Kab. Majalengka	2019	9822	121.06	0.49	7.09	8.18
Kab. Majalengka	2020	9521	138.21	1.10	7.27	11.19
Kab. Majalengka	2021	9591	151.14	1.38	7.31	11.46
Kab. Majalengka	2022	9950	147.12	1.31	7.49	9.55
Kab. Majalengka	2023	10340	138.74	0.97	7.52	8.83
Kab. Majalengka	2024	10842	134.58	0.97	7.53	7.4

Lampiran 1. Lanjutan

Kabupaten /Kota	Tahun	Pengeluaran per Kapita (Rp)	Jumlah Penduduk miskin (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kab. Purwakarta	2018	11372	75.94	1.30	7.75	9.14
Kab. Purwakarta	2019	11819	71.86	1.27	7.92	8.3
Kab. Purwakarta	2020	11614	80.17	1.54	8.09	10.68
Kab. Purwakarta	2021	11669	84.27	1.82	8.1	10.88
Kab. Purwakarta	2022	12193	83.44	1.75	8.11	8.81
Kab. Purwakarta	2023	12619	81.54	1.41	8.13	7.9
Kab. Purwakarta	2024	13099	81.44	1.38	8.14	7.82
Kab. Subang	2018	10715	136.61	1.07	6.84	6.66
Kab. Subang	2019	11012	129.18	1.08	6.85	6.12
Kab. Subang	2020	10790	149.81	0.83	7.1	9.87
Kab. Subang	2021	10854	158.97	1.11	7.11	9.76
Kab. Subang	2022	11294	155.34	1.04	7.2	7.82
Kab. Subang	2023	11537	152.33	1.23	7.45	6.97
Kab. Subang	2024	11894	152.56	1.12	7.46	6.27
Kab. Sukabumi	2018	8618	166.33	0.53	6.8	8
Kab. Sukabumi	2019	8973	153.30	0.50	7.02	8.09
Kab. Sukabumi	2020	8823	175.10	1.48	7.07	13.3
Kab. Sukabumi	2021	8850	194.35	1.77	7.1	13.07
Kab. Sukabumi	2022	9210	186.28	1.69	7.11	10.77
Kab. Sukabumi	2023	9482	178.71	1.02	7.33	10.52
Kab. Sukabumi	2024	9815	175.93	0.99	7.34	8.97
Kab. Sumedang	2018	10153	112.14	0.54	8.17	6.89
Kab. Sumedang	2019	10406	104.18	0.50	8.27	6.78
Kab. Sumedang	2020	10217	118.38	0.51	8.51	7.99
Kab. Sumedang	2021	10262	126.28	0.79	8.52	7.66
Kab. Sumedang	2022	10776	120.12	0.72	8.72	6.62
Kab. Sumedang	2023	11136	111.39	0.81	8.73	6.55
Kab. Sumedang	2024	11589	108.89	0.79	8.74	6.49
Kab. Tasikmalaya	2018	7761	172.41	0.46	7.13	5.95
Kab. Tasikmalaya	2019	8092	159.93	0.43	7.17	6.16
Kab. Tasikmalaya	2020	7852	181.52	1.04	7.35	6.73
Kab. Tasikmalaya	2021	7829	200.59	1.33	7.48	6.09
Kab. Tasikmalaya	2022	8177	194.10	1.25	7.73	5.53
Kab. Tasikmalaya	2023	8562	186.87	0.81	7.96	5.43
Kab. Tasikmalaya	2024	8965	186.75	0.79	7.97	5.44
Kota Bandung	2018	16630	89.38	0.47	10.63	7.54
Kota Bandung	2019	17254	84.67	0.43	10.74	7.7
Kota Bandung	2020	16887	100.02	0.20	10.75	9.89

Lampiran 1. Lanjutan

Kabupaten /Kota	Tahun	Pengeluaran per Kapita (Rp)	Jumlah Penduduk miskin (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kota Bandung	2021	16996	112.50	0.48	10.99	9.18
Kota Bandung	2022	17639	109.82	0.41	11	7.72
Kota Bandung	2023	18236	102.80	0.92	11.06	6.94
Kota Bandung	2024	18795	101.10	0.91	11.07	6.16
Kota Bekasi	2018	15755	119.82	2.73	11.09	8.71
Kota Bekasi	2019	16157	113.65	2.74	11.1	8.68
Kota Bekasi	2020	15776	134.01	0.83	11.16	9.48
Kota Bekasi	2021	15903	144.12	1.12	11.31	9.77
Kota Bekasi	2022	16239	137.39	1.04	11.44	7.77
Kota Bekasi	2023	16479	129.40	1.18	11.66	7.65
Kota Bekasi	2024	16775	128.84	1.04	11.79	6.73
Kota Bogor	2018	11348	64.85	1.69	10.3	9.94
Kota Bogor	2019	11825	63.97	1.67	10.32	9.73
Kota Bogor	2020	11564	75.04	0.91	10.33	11.07
Kota Bogor	2021	11716	80.09	1.19	10.53	10.7
Kota Bogor	2022	12058	79.15	1.12	10.63	8.75
Kota Bogor	2023	12656	74.95	0.96	10.64	7.72
Kota Bogor	2024	13154	73.93	0.89	10.71	7.34
Kota Cirebon	2018	11397	28.03	0.95	9.89	9.74
Kota Cirebon	2019	11930	26.80	0.95	9.9	9
Kota Cirebon	2020	11800	30.61	1.14	9.91	11.54
Kota Cirebon	2021	11810	31.98	1.43	10.12	10.09
Kota Cirebon	2022	12087	31.47	1.35	10.33	10.31
Kota Cirebon	2023	12506	29.49	0.94	10.37	8.87
Kota Cirebon	2024	12869	29.17	0.91	10.53	8.82
Kota Depok	2018	15262	49.39	3.54	10.85	8.55
Kota Depok	2019	15696	49.35	3.57	11	8.24
Kota Depok	2020	15281	60.43	1.64	11.28	12.25
Kota Depok	2021	15420	63.86	1.92	11.46	11.65
Kota Depok	2022	15926	64.36	1.85	11.47	9.63
Kota Depok	2023	16279	61.95	1.55	11.58	8.11
Kota Depok	2024	16640	62.60	1.37	11.59	6.7
Kota Sukabumi	2018	10609	23.20	1.01	9.53	3.59
Kota Sukabumi	2019	11204	21.87	0.98	9.58	4.52
Kota Sukabumi	2020	10999	25.42	1.44	9.59	5.08
Kota Sukabumi	2021	10942	27.19	1.73	9.81	3.25
Kota Sukabumi	2022	10942	26.59	1.65	10.14	1.56
Kota Sukabumi	2023	11799	24.96	1.48	10.37	1.52

Lampiran 1. Lanjutan

Kabupaten /Kota	Tahun	Pengeluaran per Kapita (Rp)	Jumlah Penduduk miskin (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kota Sukabumi	2024	12252	24.10	1.46	10.38	1.58
Kota Tasikmalaya	2018	9855	84.22	0.44	9.04	9.74
Kota Tasikmalaya	2019	10414	76.98	0.40	9.13	9.16
Kota Tasikmalaya	2020	10263	86.13	1.16	9.33	12.68
Kota Tasikmalaya	2021	10213	89.46	1.45	9.52	11.79
Kota Tasikmalaya	2022	10578	87.13	1.37	9.53	10.78
Kota Tasikmalaya	2023	11063	79.37	1.29	9.54	9.39
Kota Tasikmalaya	2024	11431	76.71	1.27	9.63	8.13
Kota Cimahi	2018	11921	29.94	1.35	10.94	9.12
Kota Cimahi	2019	12448	26.91	1.33	10.95	9.68
Kota Cimahi	2020	12025	31.64	0.48	10.96	11.52
Kota Cimahi	2021	12019	32.48	0.76	11.08	11.83
Kota Cimahi	2022	12500	31.16	0.69	11.21	9.87
Kota Cimahi	2023	12883	28.56	1.41	11.39	8.95
Kota Cimahi	2024	13278	27.00	1.39	11.52	8.04
Kota Banjar	2018	10329	10.41	0.44	8.6	8.46
Kota Banjar	2019	10705	10.07	0.41	8.62	8.35
Kota Banjar	2020	10535	11.16	1.34	8.63	9.21
Kota Banjar	2021	10476	13.37	1.62	8.77	8.3
Kota Banjar	2022	10967	12.73	1.55	8.78	6.49
Kota Banjar	2023	11356	11.66	1.17	8.79	6.46
Kota Banjar	2024	11811	11.16	1.15	8.83	6.25
Kab. Bandung Barat	2018	8329	169.00	1.26	7.97	7.84
Kab. Bandung Barat	2019	8684	159.03	1.24	8.18	8.05
Kab. Bandung Barat	2020	8455	179.46	1.65	8.19	9.6
Kab. Bandung Barat	2021	8546	190.77	1.93	8.2	9.51
Kab. Bandung Barat	2022	9044	183.67	1.86	8.22	7.77
Kab. Bandung Barat	2023	9392	179.43	1.43	8.23	7.32
Kab. Bandung Barat	2024	9583	179.70	1.40	8.24	7.11
Kab. Pangandaran	2018	8968	32.19	0.57	7.58	9.07
Kab. Pangandaran	2019	9423	30.73	0.57	7.67	9.04
Kab. Pangandaran	2020	9084	36.05	0.96	7.74	10.97
Kab. Pangandaran	2021	9065	39.07	1.24	7.85	10.53
Kab. Pangandaran	2022	9389	37.91	1.17	8.03	8.42
Kab. Pangandaran	2023	9406	36.70	0.67	8.04	7.66
Kab. Pangandaran	2024	9654	35.95	0.65	8.1	6.29

Lampiran 2 Hasil Estimasi Fixed Effects Model

Dependent Variable: TPT?

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/10/25 Time: 22:20

Sample: 2018 2024

Included observations: 7

Cross-sections included: 27

Total pool (balanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.32364	2.885461	8.776289	0.0000
PP?	-0.001646	0.000257	-6.398334	0.0000
JPM?	0.034118	0.008044	4.241633	0.0000
LPP?	0.230094	0.183651	1.252887	0.2121
RLS?	-0.475745	0.567702	-0.838019	0.4033
Fixed Effects (Cross)				
_KOTABANDUNG--C	12.98546			
_KABBANDUNG--C	-2.175216			
_KABBEKASI--C	0.349592			
_KABBOGOR--C	-12.61594			
_KABCIAMIS--C	-1.441331			
_KABCIANJUR--C	-11.07536			
_KABCIREBON--C	-8.507241			
_KABGARUT--C	-7.402395			
_KABINDRAMAYU--C	-3.676862			
_KABKARAWANG--C	-4.141245			

_KABKUNINGAN--C	-0.958895
_KABMAJALENGKA--C	-0.752936
_KABPURWAKART...	4.560106
_KABSUBANG--C	-0.468240
_KABSUKABUMI--C	-2.283921
_KABSUMEDANG--C	-0.935409
_KABTASIKMALAYA...	-8.626559
_KOTABEKASI--C	9.799046
_KOTABOGOR--C	5.053752
_KOTACIREBON--C	6.857531
_KOTADEPOK--C	12.02865
_KOTASUKABUMI--C	-1.274548
_KOTATASIKMALAY...	2.991073
_KOTACIMAHI--C	7.648693
_KOTABANJAR--C	3.156681
_KABBANDUNGBA...	-5.084717
_KABPANGANDARA...	0.800720

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.965108	R-squared	0.827953
Mean dependent var	8.095979	Adjusted R-squared	0.796574
S.D. dependent var	2.332947	S.E. of regression	1.052224
Akaike info criterion	3.084307	Sum squared resid	176.0410
Schwarz criterion	3.598870	Log likelihood	-261.4670
Hannan-Quinn criter.	3.292769	F-statistic	26.38509
Durbin-Watson stat	1.295245	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	27.696262	(26,158)	0.0000
Cross-section Chi-square	324.166873	26	0.0000

Lampiran 4 Hasil Uji Hausman

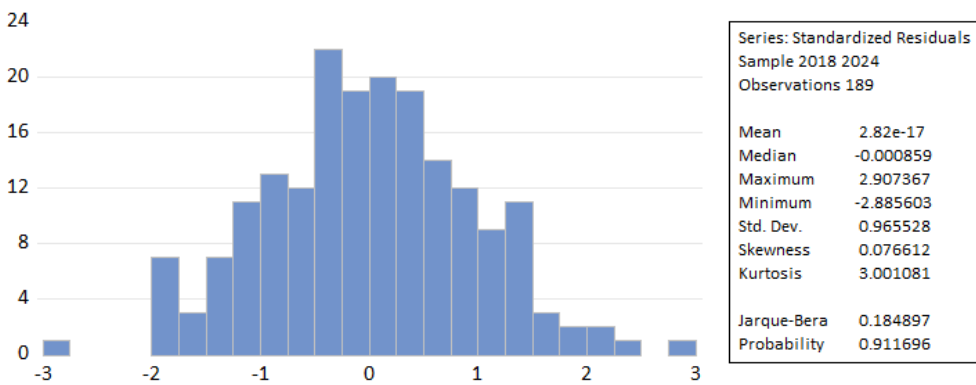
Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	69.268605	4	0.0000

Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas



Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation				
	PP	JPM	LPP	RLS
PP	1.000000	-0.302721	0.171391	0.778273
JPM	-0.302721	1.000000	0.111666	-0.452818
LPP	0.171391	0.111666	1.000000	0.209860
RLS	0.778273	-0.452818	0.209860	1.000000

Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 12/15/25 Time: 14:00

Sample: 2018 2024

Periods included: 7

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 189

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.189063	1.419170	5.065683	0.0000
PP	-0.000304	0.000127	-2.400056	0.0176
JPM	-3.09E-05	3.96E-05	-0.780831	0.4361
LPP	-0.115806	0.090326	-1.282091	0.2017
RLS	-0.286429	0.279215	-1.025835	0.3065